

Berita Jumat, 9 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Jumat, 9 Oktober 2026, menunjukkan bahwa perekonomian dunia masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memperlambat pertumbuhan. Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 mencapai 2,6%, lebih rendah dibandingkan 2,9% pada 2025. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh gejolak energi akibat konflik di Timur Tengah, yang turut meningkatkan ketidakpastian perdagangan dan kegiatan ekonomi antarnegara. Meskipun perdagangan barang dan jasa dunia diperkirakan tumbuh 4%, peningkatan tersebut sebagian didorong oleh kenaikan harga energi, sehingga belum tentu menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi yang kuat. Selain itu, perdagangan antara Amerika Serikat dan China telah menurun lebih dari 20% sejak 2024, sedangkan pengendalian ekspor dan perubahan rantai pasok semakin menyulitkan akses ke sejumlah sektor strategis. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tidak hanya bergantung pada aktivitas perdagangan, tetapi juga pada kestabilan politik, harga energi, dan hubungan ekonomi antarnegara. Oleh karena itu, negara-negara perlu memperkuat ketahanan ekonomi agar mampu menghadapi perubahan global yang dapat memengaruhi produksi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah perlambatan ekonomi global tersebut, Asia diperkirakan tetap menjadi salah satu kawasan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dunia. UNCTAD memperkirakan Asia menyumbang 59% dari pertumbuhan ekonomi global pada 2026, dengan India tumbuh 7,3%, China 4,5%, dan Indonesia 5,2%. Namun, peluang pertumbuhan tersebut tetap disertai sejumlah risiko, terutama akibat ketidakpastian perdagangan dan meningkatnya ketergantungan pasar terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI. Produk seperti semikonduktor memang menjadi pendorong perdagangan, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh negara dan masyarakat. Di Amerika Serikat, jumlah pengajuan awal tunjangan pengangguran turun menjadi 197.000 pada pekan yang berakhir 3 Oktober 2026, menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja masih relatif terbatas. Meskipun demikian, perusahaan tetap berhati-hati dalam merekrut pekerja baru karena menghadapi kenaikan biaya. Sementara itu, Jepang mengalami penurunan belanja rumah tangga sebesar 3,1% secara tahunan pada Agustus, meskipun upah riil meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah belum tentu mampu meningkatkan konsumsi apabila masyarakat masih terbebani inflasi dan biaya hidup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh daya beli yang kuat, kesempatan kerja, dan pemerataan manfaat pembangunan agar peningkatan kegiatan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.

Tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga terlihat di Thailand yang masih berupaya memperbaiki kinerja ekonominya hampir tiga dekade setelah krisis keuangan Asia 1997. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Thailand rata-rata hanya mencapai 2,34% per tahun, sementara rasio investasi terhadap produk domestik bruto berada pada kisaran 22%–23%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Thailand berupaya menarik investasi asing ke sektor semikonduktor, pusat data, manufaktur maju, dan kendaraan listrik. Pemerintah juga mendorong pengembangan energi terbarukan, peningkatan infrastruktur kelistrikan, serta kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri berteknologi tinggi. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala berupa tingginya utang rumah tangga, penurunan jumlah wisatawan, dan belum tuntasnya kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pergerakan mata uang internasional menunjukkan bahwa tekanan ekonomi juga memengaruhi pasar keuangan. Euro masih menghadapi tekanan akibat kekhawatiran terhadap utang dan ketidakpastian politik Prancis, sedangkan mayoritas mata uang Asia mengalami pelemahan sepanjang 2026 meskipun beberapa di antaranya menguat pada perdagangan harian. Rupiah sendiri mengalami penguatan tipis pada 9 Oktober, tetapi pergerakannya masih perlu dicermati di tengah tekanan global. Berbagai perkembangan tersebut

menegaskan bahwa investasi, reformasi ekonomi, stabilitas politik, dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan faktor penting untuk memperkuat pertumbuhan. Kondisi global ini juga berkaitan dengan Indonesia karena perubahan harga energi, nilai tukar, dan perdagangan internasional dapat memengaruhi penerimaan negara, biaya produksi, serta kegiatan ekonomi dalam negeri.

Di Indonesia, kondisi perekonomian hingga September 2026 memperlihatkan bahwa penerimaan negara dan belanja pemerintah terus berjalan, tetapi pengelolaan anggaran tetap membutuhkan perhatian. Realisasi pendapatan negara mencapai sekitar Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target APBN 2026, sedangkan penerimaan pajak tercatat sekitar Rp1.607 triliun atau 68,2% dari target tahunannya. Peningkatan penerimaan pajak sebesar 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya memberikan dukungan bagi pembiayaan berbagai program pemerintah. Namun, pemerintah masih perlu mengoptimalkan penerimaan agar target tahunan dapat tercapai. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi kepada wajib pajak, khususnya perusahaan padat karya dan UMKM yang membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan usaha. Hingga September 2026, restitusi pajak mencapai Rp198,71 triliun, turun 38,08% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Percepatan restitusi diharapkan dapat membantu perusahaan menjaga arus kas, membiayai produksi, dan memenuhi kewajiban kepada pekerja. Dengan demikian, kebijakan perpajakan perlu memperhatikan dua kepentingan sekaligus, yaitu menjaga penerimaan negara dan memastikan dunia usaha memperoleh haknya secara tepat waktu. Keseimbangan tersebut penting agar kebutuhan pembiayaan pembangunan tetap terpenuhi tanpa menghambat kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Selain penerimaan negara, peningkatan belanja pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga September 2026, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari target APBN, sedangkan defisit anggaran tercatat Rp319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto. Defisit tersebut terjadi karena pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatannya, meskipun nilainya masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah memperkirakan defisit akan meningkat hingga sekitar 2,85% pada akhir 2026, sesuai dengan proyeksi yang disampaikan Kementerian Keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah menyiapkan penerbitan Surat Berharga Negara melalui lelang reguler dan instrumen investasi ritel, serta membuka peluang penarikan pinjaman dari lembaga bilateral dan multilateral. Di samping itu, pemerintah terus mengarahkan belanja kepada program prioritas, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program pelayanan masyarakat. Pemerintah juga memperhatikan efisiensi pengeluaran agar anggaran tidak digunakan secara berlebihan untuk kegiatan yang kurang mendesak. Langkah tersebut diperlukan karena peningkatan belanja harus tetap diimbangi dengan kemampuan negara membiayainya. Oleh sebab itu, pengelolaan APBN perlu dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran agar belanja pemerintah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga pelayanan publik, serta melindungi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan negara.

Salah satu bentuk belanja pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta subsidi dan kompensasi energi. Hingga 30 September 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp153,19 triliun. Pelaksanaan program tersebut juga disertai upaya memperbaiki kualitas pelayanan, termasuk evaluasi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi agar makanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun atau meningkat 54,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk, sehingga masyarakat serta pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan energi dan produksi dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, besarnya realisasi subsidi yang telah mencapai 84,3% dari pagu anggaran menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun. Kenaikan harga minyak dunia, perubahan nilai tukar rupiah, dan peningkatan penggunaan barang bersubsidi dapat menambah tekanan

terhadap anggaran. Oleh karena itu, pelaksanaan program sosial dan subsidi perlu disertai pengawasan yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Upaya tersebut juga harus diikuti dengan pengendalian inflasi dan pemantauan harga kebutuhan pokok, sebab bantuan pemerintah akan lebih efektif apabila masyarakat tetap dapat membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Meskipun pemerintah berupaya menjaga daya beli melalui program sosial dan subsidi, perkembangan penjualan eceran menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat masih menghadapi tekanan. Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada September 2026 mengalami penurunan 2,3% secara bulanan, berbalik dari pertumbuhan 0,8% pada Agustus. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta barang budaya dan rekreasi. Namun, secara tahunan penjualan eceran masih diperkirakan tumbuh 1,4%, sehingga kondisi konsumsi belum sepenuhnya melemah. Pada saat yang sama, indeks ekspektasi harga menunjukkan bahwa masyarakat memperkirakan harga akan meningkat pada bulan-bulan mendatang. Keadaan ini perlu diperhatikan karena kenaikan harga dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang di luar kebutuhan pokok. Di sisi lain, rupiah ditutup menguat terbatas pada Rp17.883 per dolar AS pada 9 Oktober 2026, tetapi penguatan tersebut belum menghilangkan tekanan yang muncul akibat kondisi ekonomi global. Dengan demikian, upaya menjaga perekonomian nasional tidak cukup hanya dengan meningkatkan penerimaan negara dan mempercepat belanja pemerintah. Pemerintah juga perlu menjaga kestabilan harga, memperkuat daya beli, dan mendukung kegiatan usaha agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika melihat kondisi ekonomi daerah, tempat perubahan harga dan kegiatan perdagangan berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Di Jawa Tengah, salah satu perkembangan yang menunjukkan upaya memperkuat perekonomian daerah adalah keberhasilan Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah dalam menyerap gabah petani. Hingga Oktober 2026, realisasi penyerapan gabah telah mencapai 406.253 ton setara beras atau 108,43% dari target tahunan sebesar 374.658 ton. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyerapan gabah telah melampaui target yang ditetapkan. Langkah ini penting karena memberikan kepastian pasar bagi petani, membantu menjaga keberlangsungan usaha pertanian, dan memperkuat persediaan pangan pemerintah. Untuk mencapai hasil tersebut, Bulog mengoptimalkan jaringan pembelian di tingkat produksi, kesiapan sarana pengolahan dan pergudangan, serta penyerapan gabah pada masa panen. Persediaan yang kuat juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras dan menstabilkan harga di tingkat produsen maupun konsumen. Dengan demikian, penyerapan gabah bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan target pengadaan, tetapi juga berperan dalam menjaga pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat masih menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok. Meskipun persediaan beras diperkuat, kestabilan harga pangan secara keseluruhan tetap memerlukan perhatian karena harga komoditas lain, seperti cabai, dapat mengalami kenaikan akibat perubahan pasokan dan kondisi cuaca.

Tantangan ekonomi daerah juga terlihat pada kondisi pasar tenaga kerja dan perkembangan harga pangan di Jawa Tengah. Di Kabupaten Blora, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mencatat sebanyak 964 pencari kerja terdaftar selama Januari hingga April 2026, dengan 526 orang di antaranya telah mendapatkan penempatan kerja melalui skema penempatan lokal maupun antarnegara. Data tersebut menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memperlihatkan bahwa masih terdapat pencari kerja yang membutuhkan kesempatan kerja. Pasar kerja lokal menjadi tujuan utama penempatan, sehingga pengembangan kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja di daerah tetap diperlukan. Sementara itu, di Kota Semarang, harga cabai rawit merah meningkat hingga Rp90.000 per kilogram, sedangkan cabai keriting merah mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Peterongan, kenaikan tersebut berlangsung sekitar dua minggu dan dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari petani akibat kondisi cuaca kemarau. Meskipun pembeli masih datang ke pasar, jumlah pembelian cenderung berkurang karena harga semakin mahal. Keadaan ini menunjukkan

bahwa persoalan ketenagakerjaan dan harga pangan sama-sama memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja diperlukan agar masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kestabilan harga dibutuhkan agar pendapatan tersebut tetap memiliki daya beli yang memadai. Oleh karena itu, penguatan pasar kerja perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga pasokan dan distribusi pangan agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh kenaikan biaya hidup.

Selain menjaga ketahanan pangan dan memperluas kesempatan kerja, penguatan UMKM menjadi langkah penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang melalui program Waras Ekonomi berupaya mengembangkan UMKM dengan melakukan kurasi produk, memberikan pendampingan usaha, dan memperluas akses pemasaran. Program tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga memiliki produk berkualitas, mampu menjangkau pasar yang lebih luas, dan berpotensi menciptakan lapangan kerja. Upaya ini diperkuat melalui Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah 2026 yang melibatkan pelaku UMKM, mahasiswa calon pengusaha, dan lembaga inkubator untuk mendukung pengembangan usaha. Perluasan akses ke jaringan ritel dan peluang ekspor juga dapat membantu produk lokal memperoleh pasar baru sehingga kegiatan usaha memiliki kesempatan untuk berkembang. Jika dikaitkan dengan kondisi nasional dan internasional, pengembangan UMKM tersebut menjadi semakin penting karena perlambatan ekonomi dunia, perubahan nilai tukar, dan tekanan daya beli dapat memengaruhi biaya produksi maupun permintaan konsumen. Secara keseluruhan, rangkaian berita menunjukkan bahwa perekonomian internasional masih menghadapi ketidakpastian, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara sekaligus memperkuat daya beli, sedangkan Jawa Tengah perlu meningkatkan ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja, dan mengembangkan UMKM. Ketiga tingkatan tersebut saling berkaitan karena perubahan kondisi global dapat memengaruhi perekonomian nasional, kemudian berdampak pada harga barang, kegiatan usaha, dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang saling mendukung, mulai dari pengelolaan anggaran yang efisien dan pengendalian inflasi hingga peningkatan kualitas usaha serta penciptaan lapangan kerja. Dengan langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dapat dirasakan melalui harga kebutuhan yang lebih terjangkau, usaha yang berkembang, kesempatan kerja yang semakin luas, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Ringkasan

- Pertumbuhan ekonomi dunia melambat. UNCTAD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 2,6% pada 2026, lebih rendah dibandingkan 2,9% pada 2025. Perlambatan ini dipengaruhi oleh krisis di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi, sehingga menambah tekanan terhadap kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia.
- Asia menjadi salah satu pendorong utama ekonomi global. Asia diperkirakan menyumbang 59% pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026, dengan India tumbuh 7,3% dan China 4,5%. Indonesia juga diproyeksikan tumbuh 5,2%, meskipun perdagangan teknologi seperti semikonduktor masih menghadapi risiko akibat ketegangan antarnegara dan pembatasan perdagangan.
- Pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih cukup kuat. Jumlah pengajuan awal tunjangan pengangguran turun menjadi 197.000 pada pekan yang berakhir 3 Oktober 2026, menjadi salah satu angka terendah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan hubungan kerja masih terbatas, tetapi perusahaan tetap berhati-hati dalam menambah pekerja karena menghadapi kenaikan biaya usaha.
- Thailand berupaya memperkuat pertumbuhannya. Pemerintah Thailand mendorong investasi asing dan pengembangan industri berteknologi tinggi, seperti semikonduktor, pusat data, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Namun, lemahnya investasi dan pertumbuhan

ekonomi yang relatif lambat masih menjadi tantangan, sehingga pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

- Nilai tukar mata uang Asia bergerak terbatas. Rupiah menguat tipis menjadi Rp17.885 per dolar AS pada 9 Oktober 2026, dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.890 per dolar AS. Meskipun demikian, rupiah masih menghadapi tekanan sepanjang tahun, yang menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi global dan pergerakan dolar AS tetap memengaruhi stabilitas mata uang di kawasan Asia.
- Penerimaan pajak mengalami peningkatan, tetapi target masih perlu dikejar. Penerimaan pajak mencapai sekitar Rp1.607 triliun atau 68,2% dari target, meningkat 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah juga perlu memperhatikan pengembalian pajak agar dapat membantu menjaga arus kas perusahaan, terutama bagi UMKM dan industri padat karya yang membutuhkan dukungan untuk mempertahankan kegiatan usahanya.
- APBN tetap digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Pendapatan negara tercatat Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp319 triliun atau 1,24% dari PDB. Oleh karena itu, belanja pemerintah perlu dikelola secara efektif agar bantuan sosial, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan kesehatan anggaran negara.
- Program Makan Bergizi Gratis terus menjangkau masyarakat. Realisasi anggaran program ini mencapai Rp153,19 triliun, dengan sekitar 57 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 27.485 unit SPPG. Seiring dengan perluasan program, pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan, dan penggunaan anggaran perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
- Belanja subsidi energi mengalami peningkatan yang cukup besar. Subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% dari anggaran yang tersedia. Besarnya pengeluaran ini menunjukkan bahwa perubahan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan meningkatnya konsumsi energi dapat menambah beban APBN, sehingga pemerintah perlu menjaga ketepatan penyaluran subsidi.
- Penjualan ritel masih menghadapi tekanan meskipun tumbuh secara tahunan. Penjualan ritel diperkirakan turun 2,3% pada September dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi masih meningkat 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa aktivitas belanja masyarakat belum sepenuhnya kuat, terutama pada beberapa kelompok barang, sehingga perkembangan harga dan daya beli perlu terus diperhatikan.
- Inflasi meningkat dan berpotensi memengaruhi biaya hidup masyarakat. Inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28% secara tahunan, naik dari 3,19% pada Agustus. Kenaikan tersebut perlu dicermati karena dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, terlebih ketika nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global dan harga sejumlah kebutuhan masih berisiko mengalami perubahan.
- Penyerapan hasil panen padi di Jawa Tengah melampaui target. Bulog Jawa Tengah menyerap gabah setara beras sebanyak 406.253 ton, atau mencapai 108,43% dari target sebesar 374.658 ton. Pencapaian ini membantu petani memperoleh kepastian pasar untuk hasil panennya sekaligus memperkuat cadangan pangan, sehingga ketersediaan beras di daerah dapat lebih terjaga.
- Penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan di Kabupaten Blora. Pada Januari hingga April 2026, tercatat 964 pencari kerja dan sebanyak 526 orang telah mendapatkan pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja masih perlu diperluas melalui pengembangan usaha dan peningkatan keterampilan agar semakin banyak pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai.
- UMKM di Semarang mendapat dukungan untuk meningkatkan daya saing. Program Waras Ekonomi melakukan kurasi terhadap sekitar 1.000 UMKM untuk membantu meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan pemasaran. Melalui pendampingan tersebut, pelaku usaha

diharapkan mampu memperluas pasar ke toko modern dan hotel, sekaligus memanfaatkan peluang ekspor agar usahanya dapat berkembang lebih jauh.

- Harga cabai di Kota Semarang mengalami kenaikan tajam. Harga cabai rawit merah mencapai Rp90.000 per kilogram, naik dari kisaran Rp50.000–Rp60.000, sedangkan cabai keriting merah mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram. Kenaikan yang berlangsung selama beberapa pekan ini dipengaruhi berkurangnya pasokan akibat cuaca kemarau, sehingga pedagang menghadapi perubahan harga dan masyarakat mulai mengurangi jumlah pembelian.
- Penguatan ekonomi daerah perlu disertai upaya menjaga kestabilan harga. Jawa Tengah memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian melalui penyerapan hasil pertanian, pengembangan UMKM, dan perluasan kesempatan kerja. Namun, kenaikan harga bahan pangan tetap perlu diatasi melalui penguatan pasokan dan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau serta daya beli rumah tangga tidak semakin tertekan.

Implikasi

- Ketergantungan Sri Lanka terhadap dukungan IMF menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi negara yang mengalami masalah utang membutuhkan waktu dan kebijakan yang konsisten. Pencairan dana sekitar US\$345 juta dapat membantu memperkuat keuangan dan cadangan devisa Sri Lanka, tetapi negara tersebut tetap harus menghadapi risiko dari harga energi, konflik Timur Tengah, perdagangan global, dan El Niño. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan keuangan perlu diikuti dengan reformasi ekonomi agar pemulihan dapat berlangsung lebih berkelanjutan.
- Menguatnya dolar AS dan melemahnya euro menunjukkan bahwa kondisi fiskal dan politik dapat memengaruhi stabilitas mata uang. Ketika investor melihat adanya risiko utang dan ketidakpastian politik, dana cenderung berpindah ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS. Bagi negara berkembang, kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar dan membuat biaya pembiayaan dari luar negeri menjadi lebih mahal.
- Tingginya suku bunga global dapat meningkatkan tekanan terhadap perusahaan dan rumah tangga yang memiliki utang besar. Perusahaan harus membayar biaya pinjaman yang lebih tinggi, sedangkan rumah tangga dapat mengalami peningkatan beban pembayaran kredit. Jika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, risiko kebangkrutan dan penurunan konsumsi dapat meningkat sehingga akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- Kondisi perusahaan teknologi yang masih relatif kuat menunjukkan bahwa dampak suku bunga tinggi berbeda pada setiap sektor. Perusahaan dengan keuntungan besar dan prospek pertumbuhan yang kuat lebih mampu menghadapi biaya pinjaman yang meningkat. Sebaliknya, perusahaan dengan utang tinggi dan kemampuan menghasilkan keuntungan yang lebih terbatas akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi keuangan global.
- Konsolidasi ratusan bank kecil di China menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi dapat memberikan tekanan langsung terhadap sektor keuangan. Masalah kualitas aset, modal, dan tata kelola mendorong pemerintah memperkuat lembaga perbankan agar lebih sehat. Jika proses tersebut berhasil, stabilitas sistem keuangan China dapat meningkat, tetapi jika tekanan ekonomi berlanjut, proses restrukturisasi dapat memberikan dampak terhadap penyaluran kredit dan kegiatan usaha.
- Perkembangan ekonomi global tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi Indonesia melalui perdagangan, nilai tukar, harga energi, dan arus modal. Karena Indonesia terhubung dengan pasar internasional, perubahan kebijakan negara besar dan kondisi ekonomi dunia perlu terus dipantau. Hal ini membuat penguatan cadangan devisa, stabilitas rupiah, dan ketahanan ekonomi domestik menjadi semakin penting.
- Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya barang dan bahan baku yang berasal dari luar negeri, terutama ketika harga minyak dunia juga meningkat. Kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap biaya produksi dan transportasi sehingga berpotensi memengaruhi harga

barang di dalam negeri. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi penting untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

- Surplus perdagangan dan cadangan devisa yang masih kuat menjadi penyangga penting bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal. Surplus perdagangan memberikan tambahan penerimaan dari kegiatan ekspor, sedangkan cadangan devisa memberikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran luar negeri. Kedua kondisi tersebut dapat membantu mengurangi risiko apabila tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan semakin besar.
- Kenaikan inflasi hingga 3,28 persen menunjukkan bahwa harga masih perlu dikendalikan meskipun inflasi nasional masih berada dalam sasaran. Kenaikan harga cabai, beras, dan telur terutama dapat dirasakan oleh masyarakat karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Jika kenaikan pangan berlangsung lama, daya beli masyarakat dapat menurun dan konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penggerak ekonomi dapat ikut terpengaruh.
- Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara memberikan stimulus ekonomi dan mempertahankan kondisi fiskal yang sehat. Bantuan beras, subsidi upah, program magang, dan pelatihan dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi sekaligus menjaga aktivitas konsumsi. Namun, program tersebut perlu diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar anggaran memberikan manfaat yang maksimal.
- Tingginya jumlah PHK menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghilangkan persoalan di pasar tenaga kerja. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan dan peningkatan keterampilan agar pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat lebih mudah masuk ke sektor lain. Upaya tersebut juga penting untuk memastikan lapangan kerja yang tercipta tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga memiliki produktivitas dan perlindungan yang lebih baik.
- Kondisi ekonomi Indonesia secara umum masih memiliki dasar yang cukup kuat meskipun menghadapi tekanan global. Inflasi masih berada dalam sasaran, aktivitas manufaktur kembali berada di zona ekspansi, dan perdagangan tetap mencatat surplus. Karena itu, tantangan utama pemerintah selanjutnya adalah menjaga momentum tersebut sambil mengurangi dampak pelemahan rupiah, harga energi, dan ketidakpastian ekonomi dunia.
- Pengembangan batik Sragen menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi apabila disertai inovasi dan pemasaran yang tepat. Batik tidak hanya dapat memberikan nilai budaya, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM, perajin, pedagang, dan sektor ekonomi kreatif lainnya. Karena itu, pengembangan motif, desain, kualitas, kemasan, dan pemasaran menjadi penting agar produk batik mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
- Perluasan pasar batik hingga tingkat nasional dan ekspor dapat meningkatkan peluang pendapatan bagi perajin Jawa Tengah. Namun, untuk mencapai pasar yang lebih luas, pelaku usaha perlu menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen dan memanfaatkan teknologi digital dalam promosi. Dengan jumlah perajin yang besar, pengembangan tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM.
- Keterlibatan generasi muda menjadi penting agar industri batik dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Anak muda dapat membawa ide baru melalui desain, fesyen, pemasaran digital, dan pengembangan produk turunan. Dengan demikian, pelestarian batik tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan cara lama, tetapi juga melalui inovasi yang membuat batik tetap sesuai dengan perkembangan zaman.
- Salatiga memiliki peluang memperkuat ekonomi lokal karena berada pada jalur yang strategis dan memiliki akses tol yang mendukung mobilitas masyarakat. Konsep giant rest area dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan wisatawan dengan produk kuliner, kerajinan, dan ekonomi kreatif lokal. Jika dikelola dengan baik, pengunjung yang sebelumnya hanya melewati Salatiga dapat didorong untuk berhenti, berbelanja, dan menikmati berbagai produk daerah.

- Pengembangan kampung wisata di Magelang dapat membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat melalui potensi yang sudah dimiliki setiap kelurahan. Sejarah, budaya, kuliner, kerajinan, seni, dan lingkungan dapat dikembangkan menjadi kegiatan wisata sekaligus produk ekonomi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sehingga kampung wisata tidak hanya menjadi nama atau program administratif, tetapi benar-benar menghasilkan aktivitas dan transaksi ekonomi.
- Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di Jawa Tengah juga dapat membantu mengurangi ketergantungan daerah pada sektor ekonomi tertentu. Ketika batik, kuliner, wisata, kerajinan, dan kreativitas masyarakat dikembangkan secara bersamaan, semakin banyak sumber pendapatan yang dapat tumbuh di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah yang masih ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, industri pengolahan, perdagangan, serta peluang dari sektor pariwisata.

Berita Sabtu, 10 Oktober

Kesimpulan

Perekonomian internasional pada 10 Oktober 2026 menunjukkan kondisi yang beragam, terutama dalam hal konsumsi masyarakat, perkembangan pasar keuangan, dan kerja sama energi antarnegara. Di China, aktivitas perjalanan masyarakat selama libur Hari Nasional masih tinggi, dengan lebih dari 820 juta perjalanan domestik dan total pengeluaran yang melampaui 738 miliar yuan. Namun, tingginya jumlah perjalanan tersebut belum diikuti peningkatan pengeluaran rata-rata per perjalanan. Pengeluaran rata-rata tercatat sekitar 894 yuan, lebih rendah dibandingkan 916 yuan pada 2024 dan 911 yuan pada periode liburan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat China masih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya meskipun kegiatan pariwisata tetap ramai. Lemahnya konsumsi tersebut berkaitan dengan tekanan pasar properti, meningkatnya pengangguran, serta berkurangnya dampak program subsidi pembelian barang rumah tangga. Akibatnya, China masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingginya aktivitas masyarakat belum tentu mencerminkan kuatnya daya beli, sehingga pemulihan ekonomi juga membutuhkan peningkatan kepercayaan konsumen dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain persoalan konsumsi di China, perkembangan ekonomi global juga dipengaruhi oleh kebijakan energi dan hubungan politik antarnegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa pasokan bahan bakar solar Rusia ke Amerika Serikat dan pasar global berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian dunia. Pernyataan tersebut muncul setelah percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membahas sektor energi, perang Ukraina, situasi Iran, dan hubungan bilateral kedua negara. Trump menyebut adanya rencana pasokan solar Rusia secara bertahap, dimulai dari lebih dari 300.000 ton, kemudian tambahan 500.000 ton pada November 2026, serta pasokan berikutnya. Amerika Serikat juga telah mengeluarkan izin sementara yang memungkinkan solar Rusia masuk ke pasarnya, meskipun realisasi pengiriman masih bergantung pada kondisi kilang minyak Rusia yang sebelumnya menjadi sasaran serangan Ukraina. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hubungan politik dan keamanan dapat memengaruhi ketersediaan energi serta pergerakan pasar global. Sementara itu, pasar saham Amerika Serikat mengalami penguatan, dengan indeks Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq mencatat kenaikan pada akhir pekan. Meskipun demikian, investor masih menghadapi ketidakpastian akibat konflik di Iran, perubahan harga minyak, dan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve. Dengan demikian, penguatan pasar saham belum sepenuhnya menghilangkan risiko ekonomi global karena stabilitas pasar masih bergantung pada perkembangan geopolitik, pasokan energi, dan kebijakan moneter.

Ketidakpastian pasar global juga terlihat dari kondisi ekonomi Amerika Serikat yang memperlihatkan perbedaan antara prospek keuntungan perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Investor menantikan laporan keuangan kuartal III 2026 dari sejumlah bank besar, seperti Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, dan Morgan Stanley. Analisis memperkirakan laba perusahaan dalam indeks S&P 500 tumbuh 30,6% secara tahunan, dengan sektor energi diperkirakan mencatat pertumbuhan laba sebesar 123% dan sektor teknologi sebesar 66,5%. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan. Namun, keadaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat karena sentimen konsumen Amerika Serikat justru memburuk pada Oktober, dengan ekspektasi jangka pendek mencapai tingkat terendah sepanjang sejarah pengukuran. Penurunan kepercayaan konsumen menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 70% aktivitas ekonomi negara tersebut. Selain itu, kenaikan biaya cip memori dan harga jual produk turut menekan permintaan terhadap iPhone terbaru, sedangkan rencana SpaceX mengakuisisi portofolio spektrum frekuensi rendah berpotensi meningkatkan persaingan di industri layanan nirkabel. Di bidang pembiayaan pemerintah, Citigroup memperkirakan adanya kemungkinan pengurangan ukuran lelang obligasi jangka panjang, termasuk penghentian penerbitan obligasi bertenor 20 tahun. Perubahan tersebut masih memerlukan perhatian karena dampaknya terhadap biaya pinjaman belum dapat dipastikan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan dan penguatan pasar saham perlu diimbangi dengan pemulihan kepercayaan konsumen agar pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dapat berlangsung lebih stabil.

Perkembangan ekonomi internasional tersebut menjadi salah satu latar yang perlu diperhatikan Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional dan mengelola keuangan negara. Berdasarkan laporan realisasi APBN hingga September 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut setara dengan 74,2% dari target pendapatan negara sepanjang tahun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.847,7 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun dan telah melampaui target tahunannya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerimaan negara mengalami perkembangan positif, terutama melalui kontribusi pajak dan PNBP. Namun, peningkatan pendapatan tersebut juga diikuti oleh belanja negara yang mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu anggaran, tumbuh 19% secara tahunan. Akibatnya, APBN mengalami defisit sebesar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menyatakan bahwa defisit tersebut masih sesuai dengan pelaksanaan anggaran yang direncanakan, meskipun nilainya diperkirakan meningkat hingga sekitar 2,85% dari PDB pada akhir 2026, lebih tinggi daripada target awal sebesar 2,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan negara perlu diimbangi dengan pengelolaan belanja yang tepat agar kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap terpenuhi tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.

Sejalan dengan pelaksanaan APBN tersebut, pemerintah juga meningkatkan penyaluran subsidi dan kompensasi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan penting serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Hingga September 2026, pembayaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% dari alokasi APBN, meningkat dibandingkan Rp244,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri atas subsidi sebesar Rp222,5 triliun dan kompensasi sebesar Rp154,4 triliun, terutama untuk PT PLN dan PT Pertamina. Peningkatan penyaluran ini sejalan dengan naiknya konsumsi sejumlah barang bersubsidi, seperti BBM bersubsidi yang tumbuh 9,1%, LPG 3 kilogram sebesar 2,2%, jumlah pelanggan listrik sebesar 2,1%, dan volume pupuk bersubsidi sebesar 15,7%. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat juga meningkat 7,9%, yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah turut diarahkan untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Meskipun demikian, pengeluaran tersebut perlu dikelola secara hati-hati karena utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun per 30 Juni 2026, setara 41,26% terhadap PDB. Tekanan fiskal juga muncul dari nilai tukar rupiah yang mencapai Rp17.449 per dolar AS, inflasi September sebesar 3,28%, dan harga minyak mentah Indonesia sebesar US\$91,9 per barel, yang lebih

tinggi daripada asumsi anggaran. Sementara itu, produksi minyak dan gas masih berada di bawah target. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi penerimaan sekaligus pengeluaran negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga ketepatan penyaluran subsidi, mengendalikan kebutuhan pembiayaan, dan menyesuaikan kebijakan anggaran agar stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus mampu mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, Indonesia juga perlu memperhatikan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berita yang dibahas, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29%, melambat dibandingkan 5,61% pada kuartal sebelumnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5%, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Kelompok dengan pengeluaran lebih besar disebut lebih banyak menikmati pertumbuhan, sedangkan sebagian masyarakat lainnya masih menghadapi tekanan ekonomi dan penurunan daya beli. Kondisi ini semakin penting untuk diperhatikan ketika harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pada 10 Oktober 2026, harga beras kualitas bawah II tercatat Rp14.750 per kilogram, sedangkan beras medium I mencapai Rp16.650 per kilogram. Harga cabai merah keriting mencapai Rp84.300 per kilogram dan cabai rawit merah sebesar Rp103.450 per kilogram. Namun, tidak semua bahan pangan mengalami kenaikan karena harga daging ayam, telur, bawang, dan minyak goreng curah tercatat mengalami penurunan. Perbedaan perubahan harga tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga bergantung pada jenis kebutuhan yang dikonsumsi. Apabila kenaikan harga bahan pangan tidak diimbangi peningkatan pendapatan, masyarakat berpotensi mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, pengendalian harga pangan dan peningkatan daya beli perlu menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi nasional. Upaya tersebut juga berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi daerah, terutama dalam membantu pelaku usaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah agar tetap mampu menjalankan kegiatan ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan daya beli dan pemerataan ekonomi tersebut, pemerintah daerah di Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satunya dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui pembukaan Pasar UMKM di lingkungan Sekretariat Daerah. Pasar ini dirancang berlangsung sepanjang tahun pada hari kerja, mulai pukul 08.00 WIB hingga sekitar pukul 14.00 atau 15.00 WIB, dengan sasaran aparatur sipil negara dan tamu yang berkunjung ke lingkungan perkantoran. Pada tahap awal, tersedia lima tenda yang menampung berbagai kelompok usaha, mulai dari pelaku usaha kopi dan makanan siap saji hingga penjual produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan beras. Pelaku usaha juga akan difasilitasi untuk bergabung dengan program Belonjo Warung Tonggo, sedangkan jenis UMKM yang menempati stan akan diganti secara berkala agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan berjualan. Upaya memperluas pemasaran produk lokal tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mengembangkan wisata kuliner bertema Jaman Sayki di kawasan UMKM Jalan Raya Madukaran, Kedungwuni Barat. Kawasan ini menyediakan beragam pilihan makanan tradisional dan modern dengan harga terjangkau, sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, pemerintah berencana menyelenggarakan bursa mobil bekas setiap hari Rabu dan mengoptimalkan penggunaan sirkuit balap motor melalui berbagai acara. Pengembangan tersebut juga akan didukung dengan perbaikan akses jalan, penyediaan tempat parkir, dan pembenahan fasilitas sanitasi. Dengan bertambahnya kegiatan dan membaiknya fasilitas, kawasan UMKM diharapkan tidak hanya ramai pada akhir pekan, tetapi juga mampu menarik pengunjung pada hari lainnya. Langkah ini menunjukkan bahwa perluasan akses pasar dan peningkatan daya tarik kawasan usaha menjadi bagian penting dalam membantu UMKM meningkatkan penjualan serta mempertahankan keberlangsungan bisnis.

Selain membuka kesempatan pemasaran melalui pasar dan kawasan wisata kuliner, penguatan ekonomi masyarakat Jawa Tengah juga dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku

usaha kecil. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah menyalurkan bantuan modal produktif sebesar Rp5,25 miliar kepada 1.750 mustahik binaan, dengan setiap penerima memperoleh Rp3 juta. Penyaluran ini merupakan bagian dari target bantuan sepanjang tahun yang menyasar 3.500 mustahik dengan total anggaran Rp10,5 miliar. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa bantuan modal perlu disertai pendampingan agar dana yang diberikan benar-benar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian penerima. Untuk mendukung tujuan tersebut, Baznas melibatkan penyuluh agama di tingkat kecamatan sebagai pendamping lapangan dan melakukan evaluasi perkembangan usaha setiap empat bulan. Melalui pemantauan ini, perkembangan usaha dapat dilihat dari peningkatan kapasitas produksi, penambahan sarana usaha, hingga bertambahnya jumlah tenaga kerja. Beberapa penerima bantuan dilaporkan mampu memperbesar kapasitas tempat usaha dan menambah karyawan, sedangkan penerima lainnya menggunakan modal untuk memperbarui peralatan kerja. Salah satunya adalah perajin sol sepatu asal Kabupaten Batang yang memanfaatkan bantuan untuk membeli peralatan baru agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya. Sementara itu, pemilik warung makan di Semarang menggunakan bantuan untuk memperbarui kompor dan peralatan penyajian, serta mengembangkan pemasaran melalui layanan pemesanan makanan digital. Contoh tersebut menunjukkan bahwa bantuan modal dapat memberikan manfaat lebih besar apabila digunakan sesuai kebutuhan usaha dan disertai pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, program Baznas tidak hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan ekonomi penerima dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong mereka meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.

Di samping pengembangan UMKM dan bantuan modal, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga didukung oleh investasi industri dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Salah satu perkembangan penting adalah investasi PT HSG Material Indonesia senilai Rp710 miliar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Pembangunan pabrik material konstruksi tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 400 tenaga kerja. Fasilitas produksi yang dikembangkan mencakup tiang pancang pipa prefabrikasi, tiang pancang persegi prefabrikasi, dan beton pracetak, dengan target penjualan tahunan sebesar tiga juta meter tiang pancang beton prefabrikasi dan 150.000 meter persegi beton siap pakai. Produk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri di dalam negeri sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar regional, khususnya Asia Tenggara. Investasi ini juga menjadi bagian dari penguatan kerja sama industri Indonesia dan China melalui inisiatif Two Countries, Twin Parks, yang diarahkan untuk mendorong investasi, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok. Dengan bertambahnya kapasitas industri, peluang kerja dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan diharapkan ikut meningkat. Namun, perkembangan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada investasi swasta, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, Kabupaten Blora diproyeksikan menerima Transfer ke Daerah sekitar Rp1,49 triliun pada 2027, meningkat sekitar Rp8 miliar dibandingkan proyeksi 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum dimasukkan dalam proyeksi tersebut. Pemerintah Kabupaten Blora juga masih menunggu kepastian mengenai rencana pengalihan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK kepada pemerintah pusat serta dampaknya terhadap Dana Alokasi Umum. Kepastian ini penting karena berkaitan dengan ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan. Jika pembayaran gaji PPPK dialihkan ke pemerintah pusat tanpa mengurangi transfer yang diterima daerah, anggaran daerah berpotensi memiliki ruang lebih besar untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, investasi industri dan kepastian pendanaan daerah sama-sama berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan keseluruhan berita, perekonomian internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi saling berkaitan melalui perdagangan, harga energi, kondisi keuangan, daya beli, dan kegiatan investasi. Di tingkat internasional, lemahnya pengeluaran masyarakat China menunjukkan bahwa tingginya aktivitas perjalanan belum tentu mencerminkan kuatnya

konsumsi. Sementara itu, perkembangan kerja sama energi Rusia dan Amerika Serikat serta pergerakan pasar saham Amerika Serikat memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi global masih dipengaruhi oleh hubungan geopolitik, kepastian pasokan energi, kepercayaan konsumen, dan kebijakan moneter. Situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi. Di dalam negeri, peningkatan pendapatan negara memberikan dukungan bagi pembiayaan pembangunan dan program pemerintah, tetapi besarnya belanja, defisit APBN, utang negara, perubahan nilai tukar, dan kenaikan harga minyak menuntut pengelolaan fiskal yang hati-hati. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan karena sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup dan kenaikan harga sejumlah bahan pangan. Kondisi ini membuat penguatan ekonomi daerah menjadi semakin penting, terutama melalui program yang mampu meningkatkan pendapatan dan membuka kesempatan kerja. Di Jawa Tengah, pengembangan pasar UMKM di Magelang, wisata kuliner di Pekalongan, bantuan modal produktif Baznas, investasi industri di Kendal, serta proyeksi transfer ke daerah bagi Blora menunjukkan berbagai upaya untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut memiliki tujuan yang saling melengkapi, mulai dari memperluas pemasaran produk lokal dan meningkatkan kemampuan usaha hingga mendorong pertumbuhan industri dan memperkuat pembiayaan pembangunan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada pendampingan yang berkelanjutan, pengelolaan anggaran yang efektif, kepastian kebijakan, dan kemampuan pelaku usaha memanfaatkan peluang pasar. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga perlu memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pengendalian harga kebutuhan pokok, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja melalui investasi, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, memperkuat kemandirian usaha, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun di Jawa Tengah.

Ringkasan

- Konsumsi masyarakat China masih melemah di tengah tingginya aktivitas perjalanan. Selama libur nasional, masyarakat melakukan lebih dari 820 juta perjalanan domestik dengan total pengeluaran mencapai lebih dari 738 miliar yuan. Namun, rata-rata pengeluaran per perjalanan turun menjadi 894 yuan, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah perjalanan belum diikuti peningkatan belanja masyarakat, terutama karena tekanan pasar properti, meningkatnya pengangguran, dan berkurangnya dampak subsidi pemerintah.
- Rencana pasokan solar Rusia ke Amerika Serikat menjadi perhatian dalam perdagangan energi global. Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa pasokan minyak dan produk minyak bumi Rusia dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dunia. Setelah pembicaraan dengan Presiden Donald Trump, Rusia disebut akan memasok lebih dari 300.000 ton solar, disusul tambahan 500.000 ton pada November 2026. Meski Amerika Serikat telah memberikan izin sementara, pelaksanaan pengiriman masih bergantung pada kondisi kilang minyak Rusia dan perkembangan situasi geopolitik.
- Bursa saham Amerika Serikat menguat, tetapi ketidakpastian ekonomi masih membayangi investor. Indeks Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq mencatat kenaikan pada penutupan perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026. Penguatan ini didukung oleh harapan terhadap kinerja perusahaan pada kuartal III, terutama sektor energi dan teknologi. Namun, konflik Iran, kenaikan harga minyak, dan ketidakpastian suku bunga The Fed masih membatasi optimisme pasar. Kekhawatiran juga meningkat karena sentimen konsumen AS melemah, yang berpotensi memengaruhi konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi.
- Persaingan teknologi dan kenaikan biaya produksi memengaruhi pergerakan saham perusahaan. Saham perusahaan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan dan semikonduktor cenderung menguat seiring perkembangan teknologi. Sebaliknya, saham sejumlah perusahaan

telekomunikasi turun setelah SpaceX mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi spektrum frekuensi di Amerika Serikat. Saham Apple juga melemah setelah muncul laporan pengurangan produksi komponen iPhone akibat kenaikan biaya cip memori dan tekanan permintaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat membuka peluang pertumbuhan, tetapi persaingan dan kenaikan biaya tetap menjadi tantangan bagi perusahaan.

- Amerika Serikat mempertimbangkan perubahan penerbitan obligasi untuk mengelola pembiayaan pemerintah. Citigroup memperkirakan pemerintah AS dapat mengurangi penerbitan obligasi berjangka 20 dan 30 tahun, kemudian menambah penerbitan surat utang jangka pendek. Perubahan ini dipertimbangkan ketika imbal hasil obligasi pemerintah berada pada tingkat tinggi dan kebutuhan pembiayaan masih menjadi perhatian. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dalam menurunkan biaya pinjaman belum dapat dipastikan, sehingga pelaku pasar masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
- Peningkatan penerimaan negara belum menghilangkan defisit APBN. Hingga September 2026, penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh penerimaan perpajakan dan PNBP, yang bahkan telah melampaui target tahunannya. Namun, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau tumbuh 19%, sehingga APBN mengalami defisit Rp319 triliun atau 1,24% terhadap PDB. Pemerintah memperkirakan defisit meningkat menjadi 2,85% terhadap PDB pada akhir tahun seiring berlanjutnya kebutuhan belanja.
- Percepatan restitusi pajak diarahkan untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha. Di tengah peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terutama bagi UMKM dan industri padat karya yang membutuhkan arus kas. Hingga September 2026, realisasi restitusi mencapai Rp198,71 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan ini diharapkan membantu perusahaan memenuhi kebutuhan operasional, menjaga kelancaran produksi, dan mendukung aktivitas ekonomi.
- Kenaikan pembayaran subsidi dan kompensasi menambah kebutuhan belanja negara. Hingga September 2026, pemerintah telah membayar Rp376,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi, meningkat dibandingkan Rp244,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Pembayaran tersebut terdiri atas subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun, terutama untuk PLN dan Pertamina. Besarnya kebutuhan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berupaya menjaga keterjangkauan energi dan layanan bagi masyarakat, sekaligus perlu mengendalikan pengeluaran agar tekanan terhadap APBN tidak semakin besar.
- Pembiayaan utang menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan anggaran hingga akhir tahun. Realisasi pembiayaan utang pemerintah sampai September 2026 mencapai Rp494,3 triliun atau 59,4% dari target tahunan. Untuk memenuhi kebutuhan berikutnya, pemerintah menyiapkan lelang surat utang, penerbitan obligasi ritel, serta kemungkinan penerbitan surat utang dalam valuta asing dan penarikan pinjaman dari lembaga internasional. Pelaksanaan strategi ini akan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan agar kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi dengan biaya yang terkendali.
- Perubahan nilai tukar, inflasi, dan harga minyak menambah tantangan pengelolaan ekonomi. Rata-rata nilai tukar rupiah tercatat Rp17.449 per dolar AS, inflasi September mencapai 3,28%, dan harga minyak mentah Indonesia berada pada US\$91,9 per barel. Perubahan tersebut dapat memengaruhi biaya produksi, harga barang, dan kebutuhan subsidi energi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan perkembangan indikator ekonomi tersebut agar stabilitas harga dan kemampuan anggaran dalam membiayai program tetap terjaga.
- Perbedaan pergerakan harga pangan memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Pada 10 Oktober 2026, harga beras kualitas bawah II tercatat Rp14.750 per kilogram dan beras medium I Rp16.650 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah keriting mencapai Rp84.300 per kilogram dan cabai rawit merah Rp103.450 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam, telur,

bawang, dan minyak goreng curah mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa komoditas mengalami penurunan harga, tingginya harga cabai dan sejumlah bahan pangan tetap perlu diperhatikan karena dapat membebani pengeluaran masyarakat.

- Pasar UMKM di Kabupaten Magelang menjadi sarana memperluas pemasaran produk lokal. Pemerintah Kabupaten Magelang menghadirkan Pasar UMKM di lingkungan Sekretariat Daerah dengan lima tenda yang menyediakan kopi, makanan siap saji, serta hasil pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan beras. Pasar ini direncanakan beroperasi sepanjang tahun pada hari kerja untuk menjangkau pegawai dan pengunjung perkantoran. Selain menyediakan tempat berjualan, pemerintah juga memfasilitasi pelaku usaha melalui program Belonjo Warung Tonggo dan pergiliran penjual agar semakin banyak UMKM serta petani memperoleh kesempatan memperluas pasar.
- Pengembangan wisata kuliner Pekalongan diarahkan untuk meningkatkan kunjungan dan penjualan UMKM. Kawasan Jaman Sayki di Madukaran menyediakan berbagai pilihan makanan tradisional dan modern yang dapat menarik pengunjung. Agar aktivitas ekonomi tidak hanya ramai pada akhir pekan, pemerintah berencana mengadakan bursa mobil bekas setiap Rabu dan mengoptimalkan sirkuit balap motor melalui berbagai acara. Rencana tersebut juga disertai peningkatan akses jalan, tempat parkir, dan fasilitas umum agar kawasan lebih nyaman serta mampu menarik lebih banyak konsumen.
- Investasi industri di KEK Kendal diharapkan memperkuat ekonomi dan membuka lapangan kerja. PT HSG Material Indonesia menanamkan investasi Rp710 miliar untuk membangun pabrik material konstruksi yang diperkirakan menyerap hingga 400 pekerja. Pabrik tersebut akan memproduksi berbagai jenis tiang pancang dan beton pracetak untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan dalam negeri. Selain memperkuat industri manufaktur Jawa Tengah, investasi ini juga membuka peluang ekspor dan mendukung kerja sama industri Indonesia–China melalui peningkatan investasi, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok.
- Bantuan modal Baznas Jawa Tengah disertai pendampingan untuk mendorong kemandirian usaha. Sebanyak 1.750 mustahik menerima bantuan modal dengan total Rp5,25 miliar, masing-masing sebesar Rp3 juta. Program ini merupakan bagian dari target tahunan untuk membantu 3.500 mustahik dengan dana Rp10,5 miliar. Agar bantuan memberikan hasil berkelanjutan, Baznas menyediakan pendampingan dan evaluasi setiap empat bulan. Penerima menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki peralatan dan mengembangkan usaha, sehingga program diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, memperluas kegiatan usaha, dan membantu penerima menjadi lebih mandiri.
- Proyeksi kenaikan TKD Blora menjadi peluang sekaligus tantangan bagi anggaran daerah. Kabupaten Blora diperkirakan menerima Transfer ke Daerah sebesar Rp1,49 triliun pada 2027, meningkat sekitar Rp8 miliar dibandingkan proyeksi 2026. Nilai tersebut belum mencakup DBHCHT, sehingga penerimaan masih berpeluang bertambah. Di sisi lain, pemerintah daerah menunggu kepastian rencana pengalihan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK ke pemerintah pusat. Jika pengalihan dilakukan tanpa mengurangi TKD, pemerintah daerah berpotensi memiliki ruang anggaran lebih besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Implikasi

- Melemahnya konsumsi masyarakat China dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Meskipun jumlah perjalanan selama libur nasional meningkat, pengeluaran rata-rata masyarakat justru menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masih menghadapi tekanan akibat masalah pasar properti dan ketidakpastian pekerjaan, sehingga permintaan barang dan jasa berpotensi melemah.
- Rencana pasokan solar Rusia berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga energi dunia. Tambahan pasokan ke pasar Amerika Serikat dan global dapat membantu memenuhi kebutuhan energi. Namun, realisasinya masih bergantung pada kondisi kilang Rusia dan perkembangan konflik geopolitik, sehingga stabilitas pasokan tetap perlu diperhatikan.
- Kenaikan bursa saham Amerika Serikat belum menghilangkan ketidakpastian pasar. Harapan terhadap kinerja perusahaan, terutama sektor teknologi dan energi, mendorong kenaikan indeks saham. Namun, konflik geopolitik, harga minyak, dan kebijakan suku bunga masih dapat memengaruhi keputusan investor serta perkembangan pasar keuangan.
- Perkembangan teknologi dan perubahan strategi perusahaan dapat memengaruhi persaingan industri. Meningkatnya minat terhadap kecerdasan buatan mendorong perhatian investor pada sektor teknologi dan semikonduktor. Di sisi lain, kenaikan biaya komponen dan perubahan persaingan bisnis dapat menekan perusahaan tertentu, sehingga efisiensi produksi dan strategi pemasaran menjadi semakin penting.
- Perubahan strategi penerbitan obligasi Amerika Serikat dapat memengaruhi pasar surat utang global. Rencana mengurangi penerbitan obligasi jangka panjang dan menambah surat utang jangka pendek ditujukan untuk mengelola kebutuhan pembiayaan pemerintah. Namun, dampaknya terhadap biaya pinjaman tetap bergantung pada respons investor dan kondisi pasar keuangan.
- Peningkatan penerimaan negara perlu diimbangi dengan pengelolaan belanja yang cermat. Penerimaan APBN hingga September 2026 mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2.660,5 triliun. Kondisi ini menyebabkan defisit Rp319 triliun dan menunjukkan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif agar kebutuhan pembangunan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.
- Percepatan restitusi pajak dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, khususnya kepada UMKM dan industri padat karya, dapat memperkuat arus kas untuk membiayai operasional dan mempertahankan tenaga kerja. Agar manfaatnya optimal, proses restitusi tetap perlu dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan.
- Besarnya subsidi dan kompensasi energi menunjukkan pentingnya menjaga keterjangkauan biaya hidup. Dukungan pemerintah membantu masyarakat memperoleh energi dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi tekanan biaya bagi dunia usaha. Namun, kebutuhan anggaran yang besar membuat penyaluran subsidi perlu semakin tepat sasaran agar tidak membebani APBN secara berlebihan.
- Peningkatan kebutuhan pembiayaan utang menuntut pengelolaan fiskal yang hati-hati. Pemerintah masih membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi belanja negara hingga akhir tahun melalui penerbitan surat berharga dan sumber pinjaman lainnya. Karena kondisi pasar dan suku bunga dapat berubah, strategi pembiayaan perlu mempertimbangkan biaya utang serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas anggaran.
- Pergerakan nilai tukar, inflasi, dan harga minyak dapat memengaruhi biaya produksi serta daya beli masyarakat. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya barang impor, sedangkan kenaikan harga energi dapat menambah beban usaha dan kebutuhan subsidi. Karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dan memantau perkembangan pasar agar tekanan biaya tidak semakin dirasakan masyarakat.

- Perbedaan harga antarjenis bahan pangan menunjukkan perlunya pengawasan pasokan dan distribusi. Penurunan harga beberapa komoditas dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi tingginya harga cabai masih membebani konsumen. Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan pasokan tersedia agar gejolak harga tidak mengurangi daya beli masyarakat.
- Pasar UMKM di Kabupaten Magelang dapat memperluas pemasaran produk lokal. Fasilitas ini memberikan kesempatan bagi pedagang makanan, pelaku usaha kecil, dan petani untuk menjangkau konsumen di lingkungan perkantoran. Pergiliran penjual juga membuka peluang bagi lebih banyak usaha untuk memperoleh pendapatan dan mengembangkan pasarnya.
- Pengembangan kawasan kuliner Jaman Sayki di Pekalongan berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Beragam pilihan makanan dan rencana kegiatan tambahan dapat menarik lebih banyak pengunjung serta meningkatkan penjualan pedagang. Namun, perbaikan akses jalan, parkir, dan fasilitas umum tetap diperlukan agar kawasan tersebut nyaman dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
- Investasi Rp710 miliar di KEK Kendal berpotensi memperkuat industri dan membuka lapangan kerja. Pembangunan pabrik material konstruksi diperkirakan menyerap hingga 400 pekerja serta mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jika didukung tenaga kerja terampil dan keterlibatan pemasok lokal, investasi ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian Jawa Tengah.
- Bantuan modal Baznas Jawa Tengah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan Rp5,25 miliar kepada 1.750 mustahik memberikan modal untuk mengembangkan usaha produktif. Pendampingan dan evaluasi berkala menjadi penting agar bantuan digunakan secara efektif, pendapatan penerima meningkat, dan usaha mereka dapat berkembang secara berkelanjutan.
- Proyeksi kenaikan TKD Kabupaten Blora dapat mendukung pembangunan daerah. TKD 2027 diperkirakan mencapai Rp1,49 triliun, naik sekitar Rp8 miliar dibandingkan proyeksi 2026, dengan peluang penambahan dari komponen yang belum diperhitungkan. Pemerintah daerah tetap perlu menyesuaikan prioritas belanja dengan kepastian penerimaan dan kebutuhan pembiayaan pegawai agar pelayanan publik serta pembangunan dapat berjalan seimbang.
- Ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Perubahan konsumsi China, pasokan energi, dan kondisi pasar keuangan berpotensi memengaruhi perdagangan, biaya produksi, serta nilai tukar. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu mengantisipasi perubahan global agar dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri dapat dikendalikan.
- Pengelolaan APBN yang baik dapat mendukung stabilitas ekonomi sekaligus pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan perlu diimbangi pengendalian belanja, subsidi, dan pembiayaan utang. Dengan penggunaan anggaran yang tepat, pemerintah dapat menjaga pelayanan publik sekaligus mendukung kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
- Penguatan UMKM dan investasi industri menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi Jawa Tengah. Pasar UMKM, bantuan modal, kawasan kuliner, dan investasi di Kendal dapat memperluas pemasaran, meningkatkan produksi, serta menciptakan lapangan kerja. Agar manfaatnya berkelanjutan, berbagai program tersebut perlu didukung pendampingan usaha, infrastruktur yang memadai, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
- Sinergi kebijakan nasional dan program daerah diperlukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat. Stabilitas harga dan anggaran perlu berjalan seiring dengan pengembangan usaha lokal serta peningkatan investasi. Dengan pengelolaan yang terarah, peluang ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendorong pembangunan daerah.

Berita Minggu, 11 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah pada Minggu, 11 Oktober 2026, menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengelola keuangan, menjaga nilai mata uang, meningkatkan penerimaan, serta mendorong kegiatan usaha masyarakat. Di tingkat internasional, berbagai negara menghadapi tekanan akibat meningkatnya pembayaran bunga utang, kenaikan harga energi, dan ketidakpastian pasar keuangan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi negara berkembang karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan harus bersaing dengan kebutuhan membayar utang. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan rupiah, mengendalikan defisit anggaran, dan meningkatkan penerimaan negara. Di Jawa Tengah, perkembangan investasi dan kegiatan usaha masyarakat memberikan peluang pertumbuhan ekonomi, tetapi masih terdapat persoalan seperti tingginya harga cabai yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh pengelolaan keuangan yang baik dan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Salah satu persoalan penting dalam perekonomian internasional adalah meningkatnya beban pembayaran bunga utang yang dihadapi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Laporan Transparency International menyebutkan bahwa pembayaran bunga utang negara yang memenuhi syarat memperoleh pembiayaan lunak dari Dana Moneter Internasional meningkat hingga empat kali lipat sejak 2013, sementara hampir separuh negara dalam kelompok tersebut menghadapi krisis utang atau berisiko mengalami kesulitan pembayaran. Sedikitnya 8% penerimaan pemerintah di negara berpendapatan rendah dan menengah digunakan untuk membayar kewajiban utang, bahkan di Afrika sekitar 57% penduduk tinggal di negara yang mengalokasikan dana lebih besar untuk pembayaran bunga utang dibandingkan gabungan anggaran kesehatan, pendidikan, dan penanganan perubahan iklim. Keadaan ini memperlihatkan bahwa utang yang terlalu membebani dapat mengurangi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain besarnya pinjaman, keterbukaan informasi dan pengawasan juga menjadi persoalan penting karena perjanjian yang tidak transparan dapat membuka peluang penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pemberi pinjaman internasional perlu memperkuat pengawasan serta memastikan penggunaan utang benar-benar mendukung pembangunan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan langkah Bank Dunia yang menyiapkan bantuan bagi negara-negara yang menghadapi tekanan ekonomi.

Sebagai upaya menghadapi tekanan tersebut, Bank Dunia melakukan pembicaraan dengan sekitar 30 hingga 40 negara mengenai kemungkinan pemberian bantuan untuk mengatasi dampak perang di Timur Tengah, kenaikan harga energi, dan meningkatnya harga pupuk. Meskipun ekonomi global dinilai cukup tangguh berkat investasi di bidang kecerdasan buatan serta penyesuaian pasokan dan permintaan minyak, negara berkembang masih menghadapi kesulitan karena tingginya biaya pinjaman dan terbatasnya kemampuan anggaran. Bank Dunia memperkirakan utang negara berkembang kepada kreditur luar negeri yang jatuh tempo pada 2026 mencapai sekitar US\$400 miliar, dengan pembayaran bunga mencakup sepertiga dari jumlah tersebut. Untuk membantu negara yang membutuhkan, Bank Dunia menyiapkan dana awal sebesar US\$25 miliar yang dapat diperluas melalui pengalihan sumber daya dari proyek-proyek yang telah disetujui, sehingga total dana yang berpotensi diakses mencapai US\$60 miliar. Apabila keadaan memburuk, bantuan dapat ditingkatkan hingga US\$100 miliar. Selain menyediakan bantuan, Bank Dunia juga berupaya mendorong investasi swasta dan membantu sejumlah negara mengganti utang lama berbunga tinggi dengan pembiayaan berbunga lebih rendah. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan krisis ekonomi tidak cukup hanya melalui pemberian pinjaman baru, tetapi juga membutuhkan investasi produktif, peningkatan penerimaan

negara, dan pengelolaan utang yang lebih baik. Pentingnya menjaga kestabilan ekonomi tersebut turut terlihat dari upaya India mengendalikan pelemahan mata uangnya.

India menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupee yang telah melemah lebih dari 7% sepanjang 2026 akibat kenaikan harga minyak, tingginya imbal hasil obligasi global, dan meningkatnya kebutuhan dolar dari perusahaan pengimpor. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Bank Sentral India menyediakan fasilitas dolar bagi tiga perusahaan minyak milik negara agar kebutuhan mereka dapat dipenuhi langsung dari cadangan devisa, sehingga permintaan dolar di pasar dapat dikurangi. Bank sentral juga memperketat aturan transaksi lindung nilai dengan mewajibkan cadangan risiko sebesar 20% untuk kontrak derivatif tertentu yang bernilai lebih dari US\$2 juta, serta menurunkan batas transaksi tanpa bukti kebutuhan yang mendasarinya dari US\$100 juta menjadi US\$5 juta. Setelah kebijakan diumumkan, rupee sempat menguat sekitar 0,6% di pasar kontrak berjangka tanpa penyerahan fisik, tetapi penguatan tersebut belum memastikan bahwa tekanan terhadap mata uang akan berakhir. Pengalaman India menunjukkan bahwa intervensi bank sentral dan pembatasan transaksi dapat membantu mengurangi gejolak dalam jangka pendek, tetapi kestabilan mata uang tetap dipengaruhi oleh harga energi, arus modal, dan kondisi perdagangan. Hal ini relevan bagi Indonesia karena tekanan ekonomi global juga dapat memengaruhi rupiah, cadangan devisa, dan kepercayaan investor. Dengan demikian, kestabilan mata uang perlu dijaga melalui kebijakan yang terukur sekaligus didukung oleh kemampuan perekonomian menghasilkan devisa secara berkelanjutan.

Di Indonesia, tekanan terhadap nilai tukar terlihat dari pergerakan rupiah yang masih berfluktuasi dan penurunan cadangan devisa. Pada 9 Oktober 2026, rupiah ditutup pada Rp17.899 per dolar Amerika Serikat setelah menguat tipis sekitar 0,1% selama perdagangan sepekan. Sementara itu, cadangan devisa pada akhir September 2026 tercatat sebesar US\$146,3 miliar, turun sekitar US\$10,2 miliar dibandingkan akhir 2025. Penurunan tersebut berkaitan dengan tekanan terhadap rupiah, pembayaran utang luar negeri pemerintah, kebutuhan stabilisasi nilai tukar, dan keluarnya investasi portofolio asing sekitar US\$830 juta selama September. Meskipun demikian, cadangan devisa masih dinilai memadai karena mampu membiayai sekitar 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Artinya, kondisi tersebut belum menunjukkan kekurangan cadangan devisa secara langsung, tetapi penurunan yang berkelanjutan tetap perlu diwaspadai apabila tekanan rupiah, arus keluar modal, dan defisit transaksi berjalan terjadi bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat sumber devisa melalui peningkatan ekspor bernilai tambah, pengembangan pariwisata, dan pengurangan ketergantungan terhadap impor energi. Upaya menjaga kestabilan rupiah tersebut juga perlu disertai pengelolaan anggaran negara yang hati-hati agar tekanan dari luar tidak semakin membebani perekonomian nasional.

Selain menjaga kestabilan rupiah, pemerintah Indonesia perlu mengendalikan defisit anggaran dan mengelola utang secara hati-hati. Hingga September 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai Rp319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto. Pada periode yang sama, pemerintah telah menarik utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp497,5 triliun, sedangkan pembiayaan utang neto mencapai Rp494,3 triliun. Pembayaran bunga utang juga telah mencapai Rp444,5 triliun, sehingga pengeluaran untuk memenuhi kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah masih menilai pembiayaan berjalan sesuai rencana dan menyiapkan penerbitan surat utang serta penarikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan anggaran hingga akhir tahun. Namun, Bank of America memperkirakan defisit anggaran dapat mencapai 2,9% terhadap produk domestik bruto pada 2026 dan 2,7% pada 2027, lebih tinggi daripada target pemerintah untuk 2027 sebesar 2,4%. Perbedaan perkiraan ini menunjukkan adanya risiko yang perlu diperhatikan, terutama jika biaya subsidi energi meningkat dan penerimaan negara tidak mencapai target. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa utang digunakan untuk kegiatan produktif, pengeluaran dilakukan sesuai prioritas, dan biaya pembiayaan tetap terkendali. Langkah tersebut akan lebih efektif apabila diikuti peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan yang masih menghadapi tantangan.

Hingga September 2026, penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp492,3 triliun atau 84,4% dari target tahunan, meningkat 41,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung oleh penerimaan dari penegakan aturan kawasan hutan, kenaikan harga minyak mentah, serta meningkatnya penerimaan sumber daya alam bukan minyak dan gas. Namun, penerimaan perpajakan baru mencapai 68,6% dari target, dengan potensi kekurangan sekitar Rp46,9 triliun. Keadaan ini membuat peningkatan penerimaan pajak menjadi penting untuk menjaga defisit anggaran, terlebih pemerintah juga menghadapi tambahan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp132 triliun. Untuk memperluas pemungutan pajak, pemerintah menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri melalui sejumlah lokapasar digital dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital luar negeri, sedangkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ditargetkan mulai berlaku pada semester kedua 2027. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan kegiatan ekonomi, bukan semata-mata menambah jenis pajak baru. Meskipun demikian, penerapannya perlu memperhatikan kesiapan sistem, kepastian aturan, dan kondisi pelaku usaha agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Di samping memperkuat penerimaan dalam negeri, Indonesia juga berupaya memperluas peluang pertumbuhan melalui kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara lain.

Salah satu upaya memperluas peluang ekonomi tersebut terlihat dari penguatan kerja sama Indonesia dan Mesir melalui kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia. Kedua negara menyepakati empat kerja sama yang mencakup kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus, kerja sama statistik, serta kerja sama kelautan dan perikanan. Selain itu, kedua negara membahas pengembangan investasi, perdagangan, industri pertahanan, dan hubungan ekonomi yang lebih luas. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan nilai perdagangan bilateral hingga US\$5 miliar pada 2030 melalui dorongan pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi. Kerja sama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan mengembangkan hubungan perdagangan dengan kawasan Arab dan Afrika melalui Mesir. Namun, kesepakatan tersebut masih perlu diterjemahkan menjadi kegiatan usaha, proyek investasi, dan perdagangan yang nyata agar manfaatnya dapat dirasakan. Peluang pertumbuhan ekonomi nasional juga perlu didukung oleh perkembangan investasi di daerah, termasuk Jawa Tengah, yang menunjukkan peningkatan nilai penanaman modal dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, kerja sama internasional dan investasi daerah dapat saling mendukung dalam memperluas kegiatan ekonomi serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Di Jawa Tengah, realisasi investasi pada semester pertama 2026 mencapai Rp48,54 triliun atau sekitar 48,99% dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun, dengan total 55.989 proyek dan penyerapan 213.217 tenaga kerja. Penanaman modal asing mencapai Rp25,92 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp22,62 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa investasi berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama jika mampu menciptakan lapangan kerja dan melibatkan usaha masyarakat setempat. Selain investasi, kegiatan olahraga dan kebudayaan juga memberikan manfaat bagi perekonomian lokal. Penyelenggaraan Gubernur Cup Jawa Tengah PETE Indonesia Hard Enduro di Kabupaten Kendal meningkatkan aktivitas penginapan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam festival budaya Kabupaten Semarang mencapai Rp2 miliar pada 2026, meningkat dibandingkan sekitar Rp1 miliar pada 2025. Peningkatan tersebut menjadi alasan bagi DPRD Kabupaten Semarang untuk mendorong penggunaan anggaran festival budaya secara lebih optimal agar kegiatan yang telah berjalan dapat memberikan manfaat lebih besar. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada investasi berskala besar, tetapi juga pada kegiatan pariwisata, kebudayaan, dan usaha masyarakat. Meski demikian, peningkatan aktivitas ekonomi perlu diimbangi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok agar manfaat pertumbuhan tidak berkurang akibat meningkatnya pengeluaran rumah tangga.

Salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian di Jawa Tengah adalah tingginya harga cabai di Kabupaten Banyumas akibat terbatasnya pasokan dari petani. Pada Minggu, 11 Oktober 2026, cabai merah besar dijual sekitar Rp70.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp75.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram, dan cabai rawit merah mencapai Rp90.000 per kilogram. Keterbatasan pasokan terjadi karena tanaman dari masa tanam sebelumnya memasuki akhir produksi, sedangkan tanaman baru belum menghasilkan panen secara optimal. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah daerah memantau harga dan ketersediaan pasokan, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mendorong sentra produksi memenuhi kebutuhan Jawa Tengah sebelum memasok ke daerah lain. Subsidi juga dapat dipertimbangkan apabila kenaikan harga terus berlanjut dan mengganggu daya beli masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi, meningkatnya transaksi usaha, dan berkembangnya pariwisata perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok. Secara keseluruhan, berbagai berita tersebut memperlihatkan bahwa tantangan ekonomi internasional dapat memengaruhi kebijakan nasional, sedangkan kebijakan nasional dan perkembangan investasi daerah menentukan sejauh mana manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan keuangan, meningkatkan penerimaan negara, menggunakan anggaran secara efektif, memperluas perdagangan dan investasi, serta memperkuat produksi dan distribusi pangan. Dengan langkah yang saling mendukung dari tingkat internasional hingga daerah, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam peningkatan angka investasi dan penerimaan, tetapi juga dalam terbukanya lapangan kerja, terjaganya daya beli, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Ringkasan

- Beban utang negara berkembang semakin berat. Pembayaran bunga utang sejumlah negara berkembang meningkat hingga empat kali lipat sejak 2013. Kondisi ini membuat anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat semakin terbatas. Karena itu, transparansi pengelolaan utang dan penggunaan dana perlu diperkuat agar risiko krisis dapat dikurangi.
- Bank Dunia menyiapkan bantuan untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Bank Dunia membahas bantuan bagi sekitar 30 hingga 40 negara yang terdampak kenaikan harga energi, bahan bakar, dan pupuk akibat konflik Timur Tengah. Dana awal sebesar US\$25 miliar disiapkan, dengan potensi dukungan hingga US\$60 miliar. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban negara berkembang yang menghadapi biaya pinjaman tinggi dan keterbatasan anggaran.
- Bank Sentral India mengambil langkah untuk menahan pelemahan rupee. Rupee mengalami tekanan akibat tingginya harga minyak dan keluarnya modal asing. Untuk mengurangi permintaan dolar, bank sentral menyediakan dolar bagi perusahaan minyak milik negara dan memperketat aturan transaksi valuta asing tertentu. Kebijakan ini membantu meredam tekanan nilai tukar, meskipun ketidakpastian global masih menjadi tantangan.
- Bank Dunia meningkatkan pendanaan untuk pembangunan. Bank Dunia berhasil menghimpun US\$112 miliar dari modal swasta dan menyediakan tambahan pendanaan dari sumber internal sehingga totalnya mencapai US\$235 miliar. Dana tersebut diharapkan mendukung pembangunan ketika bantuan dari sejumlah negara donor berkurang. Namun, akses pendanaan masih belum merata, terutama bagi negara berpendapatan rendah, sehingga diperlukan upaya untuk memperluas kesempatan memperoleh pembiayaan.
- Rupiah menguat tipis setelah bergerak fluktuatif. Pada 9 Oktober 2026, rupiah ditutup pada Rp17.899 per dolar Amerika Serikat, menguat 0,1% selama sepekan. Meskipun sempat melemah pada awal dan akhir pekan, rupiah mampu menguat kembali menjelang penutupan. Pergerakannya masih dipengaruhi kondisi pasar global, arus modal asing, harga minyak, dan kebijakan suku bunga negara maju.

- Pada akhir September 2026, cadangan devisa tercatat US\$146,3 miliar, turun 6,5% dibandingkan akhir 2025. Penurunan ini dipengaruhi tekanan rupiah, pembayaran utang luar negeri, dan keluarnya sebagian modal asing. Meski demikian, cadangan devisa masih cukup untuk membiayai sekitar lima bulan impor. Pemerintah perlu memperkuat ekspor, investasi langsung, dan penerimaan devisa agar ketahanan ekonomi tetap terjaga.
- Hingga September 2026, pembiayaan utang netto mencapai Rp494,3 triliun atau 59,4% dari target tahunan. Pemerintah mempertimbangkan kondisi pasar dan suku bunga global sebelum menerbitkan surat utang agar biaya pinjaman tetap efisien. Strategi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan APBN sekaligus menjaga risiko utang agar tidak berlebihan.
- Pembayaran bunga utang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar. Hingga September 2026, pemerintah telah membayar bunga utang sebesar Rp444,5 triliun. Sementara itu, posisi utang pemerintah pada Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun atau 41,26% dari produk domestik bruto. Walaupun sejumlah indikator risiko masih terkendali, besarnya pembayaran bunga perlu diperhatikan agar anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap tersedia.
- Defisit APBN membuat peningkatan penerimaan pajak semakin penting. Hingga September 2026, defisit APBN mencapai Rp319 triliun atau 1,24% dari produk domestik bruto. Penerimaan pajak yang belum mencapai target dan tambahan kebutuhan subsidi energi menjadi tantangan bagi pemerintah. Oleh karena itu, penerimaan negara perlu ditingkatkan dan belanja harus dikelola secara efektif agar target defisit akhir tahun sebesar 2,85% dapat dijaga.
- Penerimaan negara bukan pajak meningkat. Hingga September 2026, penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp492,3 triliun, naik 41,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung setoran dari penertiban kawasan hutan, penerimaan minyak dan gas bumi, serta sumber daya alam lainnya. Capaian tersebut membantu memperkuat pendapatan negara, tetapi pemerintah tetap perlu mengembangkan sumber penerimaan yang beragam agar tidak terlalu bergantung pada harga komoditas.
- Pemerintah menyesuaikan pemungutan pajak dengan perkembangan ekonomi digital. Kebijakan yang dijalankan mencakup pemungutan pajak penghasilan pedagang melalui lokapasar digital dan pajak pertambahan nilai atas transaksi digital luar negeri. Pemerintah juga menyiapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan untuk semester II-2027. Langkah ini bertujuan memperluas kepatuhan pajak dan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesiapan aturan dan kondisi masyarakat.
- Kedua negara menyepakati kerja sama dalam bidang strategis, statistik, kelautan, dan perikanan, serta membahas perjanjian kemitraan ekonomi. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral hingga US\$5 miliar pada 2030 serta membuka peluang di bidang investasi, pendidikan, dan industri. Pelaksanaan kesepakatan tersebut menjadi penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh dunia usaha kedua negara.
- Kementerian Transmigrasi memberikan 16 perahu kepada masyarakat Tanjung Banon, Rempang, untuk mendukung perikanan dan wisata bahari. Pemerintah juga mendorong pengembangan desa nelayan dan fasilitas pendukung. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperluas usaha dan memperoleh sumber pendapatan yang lebih beragam.
- Pada semester I 2026, investasi Jawa Tengah mencapai Rp48,54 triliun atau 48,99% dari target tahunan. Investasi tersebut mencakup 55.989 proyek dan menyerap 213.217 tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap Jawa Tengah masih baik. Ke depan, pemerintah perlu menjaga iklim usaha agar investasi terus meningkat dan semakin banyak masyarakat lokal memperoleh pekerjaan.
- Transaksi UMKM dalam festival budaya meningkat dari sekitar Rp1 miliar pada 2025 menjadi Rp2 miliar pada 2026. Hasil tersebut mendorong DPRD mengusulkan agar anggaran kegiatan budaya lebih difokuskan pada acara yang sudah berjalan dan terbukti memberikan manfaat.

Selain melestarikan seni dan tradisi, festival budaya dapat menarik pengunjung serta meningkatkan penjualan pedagang lokal.

- Ajang Gubernur Cup Jawa Tengah Hard Enduro menarik peserta dan penonton yang turut meningkatkan aktivitas penginapan, kuliner, dan perdagangan. Sejumlah homestay dan pedagang lokal merasakan manfaat dari ramainya kegiatan tersebut. Acara ini diharapkan dapat menjadi agenda berkelanjutan yang mengembangkan pariwisata olahraga sekaligus meningkatkan pendapatan UMKM.
- Pada 11 Oktober 2026, harga cabai merah besar mencapai Rp70.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp75.000, cabai rawit hijau Rp70.000, dan cabai rawit merah Rp90.000. Kenaikan harga terjadi karena pasokan terbatas akibat tanaman lama memasuki akhir produksi, sedangkan panen baru belum optimal. Pemerintah daerah memantau harga, memperkuat kerja sama antardaerah, dan mempertimbangkan subsidi jika diperlukan agar pasokan tetap tersedia serta daya beli masyarakat terjaga.

Implikasi

- Meningkatnya beban pembayaran bunga utang dapat membatasi pembangunan di berbagai negara. Ketika anggaran semakin banyak digunakan untuk membayar bunga utang, dana yang tersedia untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program kesejahteraan dapat berkurang. Oleh karena itu, negara perlu mengelola utang secara hati-hati agar kewajiban pembayaran tidak menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Bantuan Bank Dunia dapat membantu negara menghadapi tekanan ekonomi. Dukungan bagi negara yang mengalami krisis berpotensi membantu menjaga keberlangsungan program pemerintah dan mengurangi dampak kesulitan ekonomi terhadap masyarakat. Namun, efektivitas bantuan tetap bergantung pada ketepatan penggunaan dana dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan pemulihan.
- Pelemahan rupee India menunjukkan pentingnya menjaga kestabilan nilai tukar. Ketika mata uang melemah, biaya pembelian barang dari luar negeri dapat meningkat dan menambah tekanan terhadap harga di dalam negeri. Langkah bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai tukar menjadi penting agar gejolak pasar tidak semakin membebani dunia usaha dan daya beli masyarakat.
- Peningkatan investasi swasta di negara berkembang dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu menyediakan modal bagi berbagai kegiatan ekonomi ketika kemampuan anggaran pemerintah terbatas. Jika investasi tersebut diarahkan pada kegiatan produktif, dampaknya dapat berupa peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan pertumbuhan ekonomi.
- Tekanan utang dan nilai tukar memperlihatkan bahwa perekonomian global saling berkaitan. Kesulitan ekonomi di suatu negara dapat memengaruhi perdagangan, arus modal, dan kepercayaan investor di negara lain. Bagi Indonesia, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kestabilan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan dari dalam negeri.
- Penguatan rupiah memberikan sinyal positif, tetapi kestabilan nilai tukar tetap perlu dijaga. Rupiah yang ditutup pada Rp17.899 per dolar Amerika Serikat pada 9 Oktober 2026 menunjukkan penguatan sekitar 0,1% selama sepekan. Meskipun demikian, nilai tukar yang masih berada pada tingkat tinggi dapat memengaruhi biaya impor dan pembayaran kewajiban dalam mata uang asing, sehingga koordinasi kebijakan ekonomi tetap diperlukan.
- Penurunan cadangan devisa perlu menjadi perhatian dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 146,3 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir September 2026, dengan kemampuan membiayai sekitar 5,2–5,3 bulan impor. Kecukupan tersebut masih menjadi penyangga penting, tetapi pengelolaannya perlu diperhatikan agar

Indonesia tetap mampu memenuhi kebutuhan pembayaran luar negeri dan menghadapi gejolak pasar keuangan.

- Besarnya pembayaran bunga utang dapat mengurangi keleluasaan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Pembayaran bunga utang yang mencapai Rp444,5 triliun hingga September 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban keuangan negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengatur pembiayaan secara hati-hati agar kebutuhan pembayaran utang tetap terpenuhi tanpa mengurangi anggaran untuk pelayanan publik dan program pembangunan prioritas.
- Defisit anggaran menuntut pengelolaan belanja dan penerimaan negara yang lebih seimbang. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai Rp319 triliun atau 1,24% dari produk domestik bruto hingga September 2026, sementara target defisit akhir tahun ditetapkan sebesar 2,85%. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengendalikan belanja yang kurang produktif sekaligus menjaga pelaksanaan program prioritas agar keuangan negara tetap terkendali.
- Belum optimalnya penerimaan pajak dapat menambah tekanan terhadap pembiayaan negara. Realisasi penerimaan pajak yang baru mencapai 68,6% dari target, disertai potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp46,9 triliun, menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengawasan. Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, pemerintah dapat menghadapi keterbatasan dalam membiayai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan belanja negara.
- Peningkatan penerimaan negara bukan pajak dapat membantu memperkuat pendapatan pemerintah. Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp492,3 triliun atau tumbuh 41,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung antara lain oleh setoran dari sektor sumber daya alam. Perkembangan ini dapat membantu mengimbangi tekanan pada penerimaan pajak, tetapi pemerintah tetap perlu menjaga agar penerimaan dari sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan tidak menjadi satu-satunya penopang pendapatan negara.
- Perluasan pengaturan pajak dapat meningkatkan penerimaan sekaligus memperkuat pengawasan kegiatan ekonomi digital. Penerapan pajak penghasilan bagi pedagang di lokapasar daring dan pajak pertambahan nilai atas transaksi digital dari luar negeri berpotensi memperluas basis penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya perlu disertai aturan yang jelas dan pemahaman yang memadai bagi pelaku usaha agar kewajiban pajak dapat dipenuhi tanpa menimbulkan kebingungan dalam menjalankan kegiatan usaha.
- Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dapat menambah sumber penerimaan negara. Kebijakan yang direncanakan pada semester kedua 2027 berpotensi memperluas penerimaan pemerintah dari produk yang dikenai cukai. Pelaksanaannya memerlukan persiapan yang baik, terutama dalam hal ketentuan, sosialisasi, dan kesiapan pelaku usaha agar kebijakan dapat diterapkan secara tertib.
- Peningkatan kerja sama perdagangan dengan Mesir dapat membuka peluang pasar baru bagi Indonesia. Target perdagangan bilateral sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030 menunjukkan adanya peluang untuk memperluas hubungan ekonomi kedua negara. Jika peluang ini didukung oleh peningkatan kualitas produk, kelancaran perdagangan, dan promosi yang tepat, pelaku usaha Indonesia dapat memperoleh kesempatan lebih besar untuk memperluas pasar ekspor.
- Pembagian kapal di Rempang berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Dukungan 16 kapal untuk sektor perikanan dan pariwisata laut dapat membantu masyarakat mengembangkan kegiatan usaha serta memanfaatkan potensi kelautan setempat. Agar manfaatnya berkelanjutan, dukungan tersebut perlu diikuti dengan pemanfaatan kapal yang produktif dan pengelolaan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

- Kondisi fiskal dan eksternal Indonesia menunjukkan pentingnya memperkuat sumber pertumbuhan dalam negeri. Tekanan penerimaan pajak, besarnya pembayaran utang, dan kebutuhan menjaga kestabilan rupiah perlu diimbangi dengan peningkatan investasi, perdagangan, serta kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya bergantung pada kondisi pasar global, tetapi juga ditopang oleh kegiatan ekonomi domestik yang kuat.
- Realisasi investasi yang cukup besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Investasi semester pertama 2026 mencapai Rp48,54 triliun atau 48,99% dari target tahunan, dengan 55.989 proyek dan penyerapan 213.217 tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan bahwa investasi berperan dalam memperluas kegiatan usaha dan membuka lapangan kerja, sehingga upaya menarik investasi perlu terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
- Peningkatan transaksi festival budaya di Kabupaten Semarang menunjukkan potensi ekonomi dari kegiatan kebudayaan. Nilai transaksi yang meningkat dari Rp1 miliar pada 2025 menjadi Rp2 miliar pada 2026 menunjukkan bahwa kegiatan budaya dapat membantu memperkenalkan produk lokal dan meningkatkan penjualan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika kegiatan tersebut diselenggarakan secara konsisten dan didukung promosi yang baik, peluang pendapatan bagi pelaku usaha setempat dapat semakin besar.
- Optimalisasi anggaran kebudayaan dapat memperkuat manfaat ekonomi kegiatan daerah. Usulan untuk mengoptimalkan anggaran kebudayaan menunjukkan perlunya memastikan bahwa dana yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan yang tepat dapat membantu kegiatan budaya berjalan lebih efektif sekaligus memperluas kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh pendapatan.
- Kegiatan Hard Enduro di Kendal dapat memperluas sumber pendapatan masyarakat. Kehadiran peserta dan pengunjung memberikan peluang bagi pemilik homestay, pedagang makanan, dan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan penjualan selama acara berlangsung. Apabila kegiatan semacam ini didukung promosi dan pengelolaan yang baik, manfaatnya dapat meluas dari penyelenggaraan acara ke perkembangan usaha lokal dan pariwisata daerah.
- Kenaikan harga cabai di Banyumas dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga. Harga cabai merah besar mencapai Rp70.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp75.000, cabai rawit hijau Rp70.000, dan cabai rawit merah Rp90.000 pada 11 Oktober 2026. Harga yang tinggi dapat meningkatkan biaya belanja masyarakat dan menambah pengeluaran usaha makanan, sehingga kondisi ini perlu diperhatikan untuk menjaga daya beli serta kestabilan harga pangan.
- Peralihan masa panen menunjukkan pentingnya menjaga kelancaran pasokan pangan. Terbatasnya pasokan cabai selama perubahan siklus panen dapat mendorong kenaikan harga di pasar. Karena itu, pemantauan stok dan koordinasi pasokan antardaerah diperlukan agar kekurangan pasokan dapat segera ditangani dan kenaikan harga tidak berlangsung terlalu lama.
- Koordinasi pemerintah dan kemungkinan pemberian subsidi dapat membantu mengurangi tekanan harga cabai. Pemantauan pasar dapat membantu mengetahui penyebab kenaikan harga dan menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi pasokan. Jika diperlukan, dukungan yang tepat sasaran dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga agar distribusi cabai tetap berjalan.
- Perkembangan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan pentingnya menggabungkan investasi, kegiatan usaha, dan kestabilan harga. Investasi dan acara daerah dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat, sementara kenaikan harga pangan dapat mengurangi manfaat yang dirasakan rumah tangga. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi daerah perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok.

Berita Senin, 12 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih menjadi tantangan bagi sejumlah negara, termasuk India. Inflasi India pada September meningkat menjadi 5,54% secara tahunan, naik dari 4,83% pada Agustus, terutama karena kenaikan harga pangan yang mencapai 7,74% serta pengaruh cuaca yang kurang mendukung. Kondisi tersebut mendorong bank sentral India menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 poin persentase menjadi 5,50% untuk mengendalikan tekanan harga. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi masih menjadi prioritas, meskipun kenaikan suku bunga juga dapat memengaruhi biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perkembangan di India memperlihatkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi dapat memengaruhi kebijakan moneter serta kondisi pasar keuangan.

Dampak kebijakan suku bunga tersebut terlihat pada pasar obligasi India yang mengalami tekanan setelah kenaikan suku bunga dan pengumuman data inflasi. Investor cenderung lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi, terutama ketika imbal hasil dan risiko pasar mengalami perubahan. Di kawasan Asia, pergerakan mata uang juga dipengaruhi oleh kekuatan dolar Amerika Serikat, perubahan ekspektasi suku bunga, serta ketidakpastian ekonomi global. Yuan Tiongkok sempat menguat terhadap dolar AS karena dukungan kinerja ekspor dan perubahan perkiraan kebijakan moneter, tetapi pergerakannya tetap menghadapi sejumlah tekanan eksternal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan negara-negara Asia saling berkaitan, sehingga perubahan kebijakan ekonomi dan nilai tukar di satu negara dapat memengaruhi keputusan investasi di negara lainnya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, investasi pada infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu faktor yang membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan bahwa kuatnya investasi AI mendukung pertumbuhan global di kisaran 3% dan memberikan peluang bagi negara-negara Asia yang memasok perangkat keras untuk teknologi tersebut. Investasi ini berpotensi meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, dan perkembangan teknologi, sehingga membantu mengimbangi tekanan akibat gangguan pasokan energi. Namun, manfaat tersebut tetap dibayangi ketegangan geopolitik, kenaikan harga minyak, dan ketidakpastian pasar keuangan. Kondisi global ini penting bagi Indonesia karena perubahan harga energi, kekuatan dolar AS, dan arus modal internasional dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, biaya impor, serta kestabilan harga di dalam negeri.

Pengaruh kondisi internasional tersebut terlihat pada pergerakan rupiah yang bertahan di sekitar Rp17.900 per dolar AS pada perdagangan 12 Oktober 2026. Pelemahan rupiah sepanjang tahun, yang dalam berita disebut telah mencapai hampir 7%, dipengaruhi oleh kuatnya dolar AS, kenaikan harga minyak, dan ketidakpastian geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah. Nilai tukar yang melemah dapat meningkatkan biaya pembelian barang impor, bahan baku industri, dan barang modal yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Pada saat yang sama, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya transportasi, logistik, dan distribusi sehingga menambah tekanan terhadap harga barang dan jasa. Dampak tersebut berkaitan dengan kondisi inflasi Indonesia yang mencapai 3,28% pada September 2026, meningkat dari 3,19% pada Agustus. Oleh karena itu, kestabilan nilai tukar dan ketersediaan barang menjadi hal penting untuk menjaga harga tetap terkendali.

Tekanan harga tersebut kemudian berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 118,5 pada Agustus menjadi 118,1 pada September, sedangkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini turun dari 109,4 menjadi 107,5. Meskipun indeks keyakinan konsumen masih berada di atas 100 atau dalam zona optimistis, penurunan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menghadapi tantangan dalam menilai kondisi ekonomi dan

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tekanan ini terutama dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli pangan dan kebutuhan rutin. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan belum tumbuh kuat, masyarakat dapat mengurangi pembelian barang yang tidak mendesak, termasuk barang bernilai besar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi perlu disertai upaya menjaga keterjangkauan harga dan memperkuat pendapatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal dan berbagai program bantuan benar-benar mendukung aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat. Dalam berita yang dihimpun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp492,3 triliun, atau 107,2% dari target APBN sebesar Rp459,2 triliun, sementara realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp376,8 triliun hingga September 2026. Angka tersebut menunjukkan adanya penerimaan negara yang melampaui target serta dukungan pemerintah untuk membantu menjaga keterjangkauan sejumlah kebutuhan. Selain itu, kebijakan mengenai prioritas pembayaran utang pajak melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 mengatur pembayaran pokok utang pajak sebelum sanksi administratif dan tidak dapat disamakan dengan pengampunan pajak. Namun, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan dan belanja, melainkan juga oleh ketepatan penyaluran bantuan, pengendalian harga, serta kemampuan program pemerintah membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Upaya menjaga daya beli tersebut penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,98% pada semester I 2026, sedangkan kegiatan konsumsi yang berkaitan dengan mobilitas, perjalanan, gaya hidup, serta sektor hotel dan restoran turut mendukung aktivitas ekonomi. Meski demikian, tekanan harga pangan, biaya produksi, dan distribusi dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk berbelanja, terutama menjelang akhir tahun. Karena itu, peningkatan konsumsi perlu didukung oleh penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta percepatan belanja pemerintah yang efektif. Tantangan nasional tersebut juga terlihat di tingkat daerah, sebab kestabilan harga dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat bergantung pada kelancaran pasokan pangan serta kegiatan ekonomi setempat.

Salah satu contoh upaya menjaga kestabilan harga terlihat di Jawa Tengah melalui gerakan pangan murah dan pemberian bantuan yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, petani, serta pihak terkait lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang tersebut bertujuan membantu masyarakat, pedagang kecil, dan pelaku usaha katering menghadapi kenaikan harga bahan pokok, terutama cabai dan beras. Harga cabai merah di pasaran dilaporkan mencapai sekitar Rp80.000–Rp90.000 per kilogram, sehingga kenaikan tersebut dapat menambah biaya usaha dan mengurangi keuntungan pedagang makanan. Melalui gerakan pangan murah, sejumlah bahan pokok dapat dibeli dengan harga lebih terjangkau, sehingga membantu pelaku usaha mempertahankan biaya produksi tanpa harus langsung menaikkan harga jual kepada pelanggan. Langkah ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi daerah perlu dilakukan secara langsung dan melibatkan banyak pihak agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

Selain menjaga keterjangkauan harga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya mempertahankan produksi pangan untuk mengantisipasi dampak El Niño atau kekeringan. Bantuan berupa beras, sarana perpipaan, dan rumah burung hantu diberikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta menjaga produktivitas pertanian. Pada periode Januari hingga Oktober 2026, produksi padi Jawa Tengah diperkirakan mencapai 8,4 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 4,9 juta ton beras, sementara produksi cabai tercatat sekitar 404,91 ribu ton dan bawang merah sekitar 408,76 ribu ton. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran Jawa Tengah dalam penyediaan bahan pangan, tetapi produksi yang tinggi tetap perlu didukung oleh distribusi yang lancar dan pengelolaan pasokan

yang baik agar tidak terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen. Di sisi lain, kegiatan Gubernur Cup Jateng PETE Indonesia Hard Enduro juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penggunaan penginapan, aktivitas kuliner, dan penjualan produk UMKM. Dengan demikian, penguatan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu menjaga sektor pangan sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi yang mendatangkan penghasilan bagi masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat, pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan penting di Jawa Tengah. Hal tersebut terlihat di Kabupaten Klaten, yang berdasarkan data tahun 2025 memiliki tingkat kemiskinan sebesar 11%, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 9,39%. Pertumbuhan ekonomi Klaten yang mencapai 4,62% juga masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 5,37%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu secara otomatis mengurangi kemiskinan apabila kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan manfaat pembangunan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Karena itu, penguatan koordinasi antara kepala daerah, wakil kepala daerah, dan perangkat pemerintah menjadi penting untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, rangkaian berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi membutuhkan kerja yang saling terhubung, mulai dari menjaga stabilitas keuangan dan mengendalikan inflasi hingga memastikan pasokan pangan, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan usaha lokal, dan mengurangi kemiskinan. Dengan kebijakan yang tepat sasaran serta kerja sama pemerintah, dunia usaha, petani, dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya bertahan menghadapi tekanan global, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih merata bagi kehidupan masyarakat.

Ringkasan

- Inflasi India pada September 2026 mencapai 5,54%, naik dari 4,83% pada Agustus, terutama akibat kenaikan harga pangan dan cuaca yang kurang mendukung. Untuk mengendalikan inflasi, bank sentral India menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50%. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok masih menjadi tantangan bagi perekonomian India.
- Kenaikan suku bunga India memengaruhi pasar obligasi, sementara pergerakan mata uang Asia dipengaruhi oleh kekuatan dolar AS dan ketidakpastian perdagangan global. Kondisi tersebut membuat investor lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan investasi. Perubahan ini juga dapat memengaruhi arus modal dan kestabilan keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
- IMF menyatakan bahwa investasi infrastruktur kecerdasan buatan atau AI membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi global di sekitar 3%. Negara-negara Asia berpeluang memperoleh manfaat dari meningkatnya kebutuhan perangkat teknologi. Namun, kenaikan harga energi dan ketegangan geopolitik masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi perdagangan serta perekonomian global.
- Pada 12 Oktober 2026, rupiah bertahan di sekitar Rp17.900 per dolar AS dan mengalami pelemahan hampir 7% sepanjang tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak, dan ketidakpastian di Timur Tengah. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor serta mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi barang di Indonesia.
- Inflasi Indonesia pada September 2026 meningkat menjadi 3,28% dari 3,19% pada Agustus, sementara Indeks Keyakinan Konsumen turun menjadi 118,1. Walaupun masyarakat masih berada dalam zona optimistis, kelompok berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap kenaikan

harga kebutuhan pokok. Kondisi ini dapat membuat masyarakat mengurangi belanja yang tidak mendesak.

- Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp492,3 triliun atau 107,2% dari target APBN, sedangkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp376,8 triliun hingga September 2026. Pemerintah juga menerapkan aturan mengenai prioritas pembayaran utang pajak melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026. Kebijakan tersebut perlu didukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran agar dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat.
- Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 53% terhadap PDB Indonesia dan tumbuh 4,98% pada semester I 2026. Aktivitas perjalanan, gaya hidup, hotel, dan restoran turut mendukung kegiatan ekonomi. Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat membatasi belanja masyarakat sehingga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan tetap diperlukan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia, Bulog, dan petani mengadakan gerakan pangan murah di wilayah Kabupaten Semarang. Program ini membantu masyarakat, pedagang makanan, dan usaha katering menghadapi kenaikan harga cabai dan beras. Melalui harga yang lebih terjangkau, biaya usaha dapat ditekan dan kestabilan harga pangan diharapkan tetap terjaga.
- Pemerintah daerah memberikan bantuan untuk menghadapi risiko kekeringan akibat El Niño dan menjaga produktivitas petani. Pada Januari–Oktober 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 8,4 juta ton gabah kering giling, setara 4,9 juta ton beras. Selain itu, kegiatan Hard Enduro di Jawa Tengah turut menggerakkan penginapan, kuliner, perdagangan, dan UMKM sehingga membuka peluang pendapatan bagi masyarakat setempat
- Pada 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Klaten mencapai 11%, lebih tinggi daripada Jawa Tengah sebesar 9,39%. Pertumbuhan ekonomi Klaten juga sebesar 4,62%, masih di bawah pertumbuhan provinsi yang mencapai 5,37%. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan lapangan kerja, produktivitas, dan koordinasi pemerintah daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Secara keseluruhan, kestabilan ekonomi membutuhkan pengendalian inflasi, perlindungan daya beli, ketersediaan pangan, serta pengembangan usaha lokal agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan

Implikasi

- Kenaikan inflasi India mendorong perlunya pengendalian harga yang lebih kuat. Inflasi India yang mencapai 5,54% dan kenaikan harga pangan dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat serta mengurangi kemampuan membeli kebutuhan sehari-hari. Kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,50% dapat membantu mengendalikan tekanan inflasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu memperhatikan kestabilan harga sekaligus menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
- Ketidakpastian pasar keuangan Asia dapat memengaruhi arus investasi antarnegara. Perubahan suku bunga, penguatan dolar AS, dan pergerakan mata uang membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya. Kondisi ini dapat meningkatkan tekanan terhadap negara berkembang yang membutuhkan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia, perubahan tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kepercayaan investor, kestabilan keuangan, dan ketahanan ekonomi terhadap perubahan kondisi global.
- Investasi AI membuka peluang pertumbuhan, tetapi ketergantungan pada energi tetap menjadi risiko. Peningkatan investasi infrastruktur kecerdasan buatan berpotensi memperluas produksi, perdagangan teknologi, dan kesempatan ekonomi bagi negara-negara Asia. Namun, manfaat tersebut dapat terhambat apabila harga energi meningkat atau ketegangan geopolitik mengganggu pasokan dan perdagangan internasional. Karena itu, negara-negara yang ingin memanfaatkan peluang investasi teknologi perlu menjaga kestabilan ekonomi sekaligus

memperhatikan ketersediaan energi dan risiko eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan produksi.

- Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi dan harga barang di dalam negeri. Nilai rupiah yang berada di sekitar Rp17.900 per dolar AS membuat pembelian bahan baku, barang modal, dan sejumlah komoditas impor berpotensi menjadi lebih mahal. Kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi, sehingga tekanan harga dapat dirasakan oleh produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga kestabilan nilai tukar serta memastikan pasokan barang tetap tersedia agar dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian masyarakat dapat dikurangi.
- Kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi mempersempit kemampuan belanja masyarakat. Peningkatan inflasi menjadi 3,28% dan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen menjadi 118,1 menunjukkan bahwa tekanan harga perlu diperhatikan meskipun masyarakat masih berada dalam zona optimistis. Kelompok berpenghasilan rendah berisiko paling besar terdampak karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dapat membuat masyarakat menunda pembelian barang yang tidak mendesak, sehingga pengendalian harga pangan dan peningkatan pendapatan menjadi penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga.
- Kebijakan fiskal perlu diarahkan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp492,3 triliun serta realisasi subsidi dan kompensasi sebesar Rp376,8 triliun hingga September 2026 menunjukkan besarnya peran pengelolaan keuangan negara dalam mendukung perekonomian. Namun, penerimaan dan belanja tersebut perlu dikelola secara efektif agar mampu membantu menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok serta mendukung kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan perpajakan perlu diterapkan secara jelas agar masyarakat dan pelaku usaha memahami kewajibannya, sementara bantuan dan insentif pemerintah sebaiknya diarahkan kepada pihak yang paling membutuhkan.
- Konsumsi rumah tangga perlu dijaga karena berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kontribusi lebih dari 53% terhadap PDB, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi Indonesia. Apabila kenaikan harga terus membatasi belanja masyarakat, pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran juga berpotensi terpengaruh. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi perlu disertai penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penyaluran perlindungan sosial yang tepat sasaran agar daya beli tetap terjaga. Langkah tersebut juga penting bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, yang membutuhkan permintaan masyarakat yang stabil untuk mendukung usaha lokal.
- Gerakan pangan murah dapat membantu mengurangi tekanan biaya hidup dan biaya usaha. Kenaikan harga cabai dan beras di Jawa Tengah berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga serta biaya produksi pedagang makanan dan usaha katering. Melalui gerakan pangan murah yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan petani, masyarakat serta pelaku usaha dapat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Program ini berpotensi membantu menjaga harga jual makanan dan mengurangi tekanan terhadap keuntungan usaha kecil. Agar dampaknya berkelanjutan, upaya tersebut perlu disertai pemantauan harga dan ketersediaan pasokan sehingga bahan pokok tetap mudah diperoleh masyarakat.
- Perlindungan produksi pangan dan pengembangan wisata dapat memperkuat ekonomi daerah. Ancaman El Niño membuat bantuan pertanian, sarana perpipaan, dan pengelolaan pola tanam menjadi penting untuk menjaga produksi pangan Jawa Tengah. Produksi padi yang diperkirakan mencapai 8,4 juta ton gabah kering giling pada Januari–Oktober 2026 menunjukkan besarnya peran provinsi ini dalam penyediaan pangan, sehingga kelancaran distribusi juga perlu dijaga agar pasokan tidak terganggu. Di sisi lain, kegiatan Hard Enduro dapat meningkatkan pendapatan penginapan, pedagang kuliner, dan UMKM melalui

kedatangan peserta serta penonton. Jika kegiatan semacam ini dikembangkan secara berkelanjutan dan melibatkan usaha lokal, manfaat ekonomi berpeluang menyebar ke lebih banyak masyarakat.

- Pengentasan kemiskinan di Klaten membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Tingkat kemiskinan Klaten sebesar 11% pada 2025, lebih tinggi daripada Jawa Tengah yang mencapai 9,39%, sementara pertumbuhan ekonominya sebesar 4,62% masih di bawah pertumbuhan provinsi sebesar 5,37%. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya pembangunan yang tidak hanya mengejar peningkatan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat pendapatan masyarakat. Koordinasi antara kepala daerah, wakil kepala daerah, dan perangkat pemerintah diperlukan agar program pengentasan kemiskinan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi internasional hingga daerah memperlihatkan bahwa tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar, dan kenaikan biaya produksi saling berkaitan dengan daya beli serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengendalian harga, penguatan produksi pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan UMKM perlu berjalan bersama agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Berita Selasa, 13 Oktober

Kesimpulan

Perekonomian dunia pada 2026 diperkirakan masih tumbuh, tetapi menghadapi berbagai tantangan yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,1 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 3,4 persen pada 2027. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih dibayangi konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak tetap tinggi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Keadaan ini menunjukkan bahwa perekonomian global masih mampu bertahan, tetapi ketahanannya semakin tertekan karena kenaikan biaya energi dapat meningkatkan harga barang dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Oleh karena itu, perkembangan konflik dan kestabilan pasokan energi menjadi faktor penting yang memengaruhi arah pertumbuhan ekonomi dunia.

Di tengah berbagai tekanan tersebut, investasi dalam kecerdasan buatan menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga pertumbuhan ekonomi global. Pengembangan teknologi ini mendorong investasi, meningkatkan kebutuhan terhadap perangkat keras, dan membuka peluang peningkatan produktivitas di berbagai sektor usaha. Dampaknya terlihat pada sejumlah negara yang diperkirakan masih memiliki prospek pertumbuhan cukup baik, termasuk Amerika Serikat, India, dan beberapa negara di Asia. Namun, manfaat investasi teknologi tersebut belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh negara karena kemampuan masing-masing negara dalam memanfaatkan perkembangan teknologi berbeda-beda. Selain itu, investasi yang besar juga dapat menimbulkan risiko keuangan apabila tidak diimbangi dengan hasil yang sesuai harapan. Dengan demikian, investasi kecerdasan buatan dapat menjadi penopang ekonomi dunia, tetapi tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko dan kebijakan ekonomi yang tepat.

Selain pertumbuhan ekonomi yang belum merata, kenaikan harga energi juga menjadi penyebab utama tekanan inflasi di berbagai negara. Dana Moneter Internasional memperkirakan inflasi konsumen global mencapai 4,7 persen pada 2026 dan menurun menjadi 4,1 persen pada 2027. Namun, apabila konflik di Timur Tengah semakin meluas dan harga minyak terus meningkat, tekanan inflasi dapat menjadi lebih besar sehingga biaya produksi, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari ikut naik. Kondisi tersebut juga terlihat di Jepang, ketika inflasi harga grosir mencapai 6,8 persen pada September

2026 dan harga barang impor meningkat 24,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan biaya impor, terutama akibat pelemahan yen dan tingginya harga energi, dapat diteruskan kepada konsumen apabila perusahaan menaikkan harga jual. Situasi ini membuat Bank Sentral Jepang perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian inflasi dan menjaga kegiatan ekonomi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga di tingkat internasional dapat memengaruhi kebijakan bank sentral sekaligus kondisi ekonomi masyarakat.

Tekanan ekonomi global juga tercermin dari pelemahan sejumlah mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk rupiah Indonesia. Pada perdagangan 13 Oktober 2026, rupiah berada di kisaran Rp17.935 per dolar Amerika Serikat dan tercatat melemah sekitar 7,05 persen sejak awal tahun. Pelemahan mata uang di kawasan Asia menunjukkan bahwa ketidakpastian global masih memengaruhi pergerakan pasar keuangan dan kepercayaan investor. Bagi Indonesia, rupiah yang melemah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, barang modal, dan kebutuhan lain yang pembayarannya menggunakan mata uang asing. Apabila kenaikan biaya tersebut diteruskan ke harga jual, tekanan terhadap inflasi dalam negeri juga dapat meningkat. Oleh sebab itu, perkembangan nilai tukar tidak hanya berkaitan dengan pasar keuangan, tetapi juga berhubungan dengan harga barang, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah ketika menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Menghadapi ketidakpastian global tersebut, Indonesia perlu menjaga kestabilan ekonomi sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan dari dalam negeri. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga defisit anggaran negara sebesar 3 persen dari produk domestik bruto dan rasio utang sebesar 60 persen dari produk domestik bruto. Pengelolaan anggaran tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar pemerintah tetap memiliki ruang untuk membiayai program prioritas, seperti ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengembangan industri pengolahan. Selain itu, penguatan pasar modal dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri diharapkan dapat memperluas kegiatan ekonomi dan menciptakan sumber pertumbuhan baru. Pemerintah juga memiliki harapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi penduduk usia produktif. Namun, upaya tersebut perlu didukung oleh peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, dan pengelolaan anggaran yang efektif agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Meskipun pemerintah berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih menjadi perhatian. Berita mengenai penerimaan pajak di Jawa Barat menunjukkan bahwa realisasi penerimaan sebesar Rp77 triliun masih berada di bawah target Rp122 triliun. Keadaan ini menggambarkan pentingnya memperkuat penerimaan negara agar pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pada saat yang sama, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025, sehingga kemampuan belanja sebagian masyarakat perlu mendapat perhatian. Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun untuk 2027 sebagai salah satu upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan dan penerimaan negara, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang memadai. Kebutuhan tersebut semakin penting ketika harga pangan dan biaya produksi berpotensi meningkat akibat tekanan ekonomi global.

Salah satu persoalan yang langsung dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai. Pada 13 Oktober 2026, harga cabai rawit merah tercatat Rp105.300 per kilogram, cabai merah besar Rp73.800 per kilogram, cabai merah keriting Rp88.350 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp78.850 per kilogram. Tingginya harga tersebut berkaitan dengan keterbatasan pasokan dan gangguan produksi yang dapat dipengaruhi kondisi cuaca. Kenaikan harga pangan menjadi

perhatian karena dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang rentan mengalami penurunan daya beli. Dalam kondisi seperti ini, bantuan sosial dan belanja pemerintah dapat membantu menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Namun, perlindungan terhadap daya beli juga perlu disertai upaya memperbaiki pasokan dan distribusi pangan agar harga tidak terus meningkat. Persoalan tersebut memperlihatkan hubungan antara kebijakan ekonomi nasional dan kondisi masyarakat di daerah, termasuk kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga pangan di Jawa Tengah.

Selain masalah pangan, perekonomian Indonesia juga menghadapi tantangan dari industri tekstil yang mengalami tekanan akibat persaingan dan meningkatnya penggunaan produk impor. Dalam empat tahun terakhir, lebih dari 100 perusahaan dilaporkan tutup dan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan berdasarkan perkiraan asosiasi industri. Pada saat yang sama, rasio impor tekstil meningkat dari 55 persen menjadi 83 persen dalam sepuluh tahun, sedangkan kontribusi industri tekstil terhadap produk domestik bruto menurun dari 3,5 persen menjadi 0,97 persen. Kenaikan impor benang dan kain juga menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi industri dalam negeri. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani, kemampuan perusahaan lokal untuk mempertahankan produksi dan tenaga kerja dapat semakin melemah. Oleh karena itu, penguatan industri tekstil memerlukan pengawasan terhadap masuknya barang impor, penerapan aturan secara adil, dan peningkatan daya saing perusahaan dalam negeri. Upaya ini penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh investasi di sektor tertentu, tetapi juga oleh industri yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Tantangan ekonomi nasional tersebut berkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Tengah, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah untuk memperluas pelayanan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 koperasi telah terbentuk, dengan 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen sudah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan. Selain itu, sebanyak 5.895 gedung koperasi telah selesai dibangun. Pemerintah daerah juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi 5.040 bendahara serta memfasilitasi hubungan usaha di 35 kabupaten dan kota. Koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, pupuk dan gas bersubsidi, serta layanan keuangan, tetapi juga membantu memasarkan hasil pertanian dan produk usaha masyarakat. Agar manfaatnya semakin besar, kegiatan koperasi perlu disesuaikan dengan potensi setiap wilayah dan didukung pengelolaan yang baik. Dengan begitu, koperasi dapat menjadi penghubung antara kegiatan produksi masyarakat, pemasaran produk lokal, dan peningkatan pendapatan di tingkat desa.

Selain memperkuat kegiatan ekonomi melalui koperasi, Jawa Tengah juga perlu menjaga kestabilan harga pangan dengan meningkatkan produksi dan memperlancar distribusi, terutama untuk komoditas yang harganya mudah berubah seperti cabai. Bank Indonesia Perwakilan Purwokerto mendorong kerja sama antardaerah untuk memastikan pasokan dari wilayah yang mengalami surplus dapat disalurkan ke wilayah yang membutuhkan. Upaya tersebut perlu didukung pemantauan harga dan perkiraan panen, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami tekanan harga tinggi, serta pengurangan hambatan distribusi yang dapat meningkatkan biaya angkut. Peningkatan produktivitas pertanian juga penting agar ketersediaan pangan tidak hanya bergantung pada pasokan dari daerah lain. Secara keseluruhan, berita ekonomi internasional, nasional, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa ketidakpastian global dapat memengaruhi nilai tukar, inflasi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat hingga ke tingkat daerah. Oleh karena itu, menjaga kestabilan ekonomi membutuhkan kebijakan yang saling mendukung, mulai dari pengelolaan anggaran dan penguatan industri nasional hingga peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan koperasi, serta kelancaran distribusi pangan. Dengan langkah yang terkoordinasi, ketahanan ekonomi dapat diperkuat sekaligus membantu masyarakat menghadapi perubahan harga dan menjaga kegiatan usaha tetap berjalan.

Ringkasan

- Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi dunia tumbuh 3,1 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027. Namun, konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak masih menjadi ancaman bagi pertumbuhan tersebut. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi, sehingga kegiatan usaha serta daya beli masyarakat di berbagai negara ikut tertekan.
- Investasi dalam teknologi kecerdasan buatan membantu meningkatkan prospek ekonomi sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, dan Thailand. Meskipun demikian, manfaatnya belum dirasakan secara merata karena pertumbuhan global semakin terkonsentrasi pada sejumlah negara. Selain itu, investasi teknologi juga memiliki risiko apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, sehingga pengembangan teknologi perlu diimbangi dengan pengelolaan investasi yang baik.
- Dana Moneter Internasional memperkirakan inflasi global mencapai 4,7 persen pada 2026 dan menurun menjadi 4,1 persen pada 2027. Namun, jika konflik Timur Tengah berlangsung lebih lama, harga minyak berpotensi meningkat dan mendorong kenaikan biaya produksi, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kestabilan pasokan energi menjadi penting untuk menjaga harga barang dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Amerika Serikat diperkirakan tumbuh 2,3 persen pada 2026, zona euro 1,1 persen, dan China 4,5 persen. Sementara itu, India diproyeksikan tumbuh 7 persen, sedangkan sejumlah negara Teluk menghadapi tekanan berat akibat konflik dan ketergantungan pada sektor energi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dampak ketidakpastian global bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing negara, termasuk kekuatan permintaan dalam negeri dan kemampuan menghadapi kenaikan harga energi.
- Inflasi harga grosir Jepang mencapai 6,8 persen pada September 2026, sementara harga impor meningkat 24,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pelemahan yen, konflik internasional, dan meningkatnya permintaan terhadap sejumlah bahan baku. Kondisi ini mendorong Bank Sentral Jepang mencermati kemungkinan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat dan kegiatan usaha.
- Pada 13 Oktober 2026, rupiah tercatat melemah sekitar 7,05 persen sejak awal tahun, diikuti pelemahan beberapa mata uang di kawasan Asia. Pergerakan ini mencerminkan tekanan pasar keuangan akibat ketidakpastian ekonomi global. Bagi negara yang bergantung pada barang dan bahan baku impor, pelemahan mata uang dapat meningkatkan biaya pembelian dari luar negeri dan berpotensi mendorong kenaikan harga di dalam negeri.
- Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026, pembayaran utang pajak diprioritaskan untuk melunasi pokok utang terlebih dahulu sebelum sanksi administratif. Kebijakan ini diharapkan membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dan menjaga kelancaran keuangan usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, kebijakan tersebut bukan penghapusan utang pajak karena pokok utang tetap wajib dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.
- Hingga akhir September 2026, penerimaan pajak Jawa Barat mencapai sekitar Rp77 triliun dari target Rp122 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp45 triliun. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi strategi perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan data serta perbaikan pengawasan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara agar pembiayaan pembangunan berjalan lebih optimal.
- Jumlah penduduk kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran karena kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

perluasan insentif pajak dan perlindungan sosial dinilai penting untuk menjaga daya beli, membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta mencegah tekanan ekonomi yang lebih besar terhadap masyarakat.

- Peningkatan kualitas tenaga kerja diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki ambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan memanfaatkan besarnya jumlah penduduk usia produktif. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa dukungan pendidikan, keterampilan, kesehatan, produktivitas, dan kesempatan kerja yang memadai. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing perusahaan perlu diperkuat agar penduduk usia produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia pada masa mendatang.
- Industri tekstil nasional menghadapi tekanan akibat produk impor. Dalam empat tahun terakhir, lebih dari 100 perusahaan dilaporkan tutup dan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Industri menilai lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan impor ilegal dan praktik dumping memperburuk persaingan dengan produsen dalam negeri. Selain itu, meningkatnya penggunaan produk impor dan menurunnya kontribusi industri tekstil terhadap perekonomian menunjukkan perlunya langkah perbaikan. Pengawasan impor, penegakan aturan secara adil, dan peningkatan efisiensi produksi diperlukan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan serta melindungi lapangan kerja.
- Koperasi Merah Putih dikembangkan untuk memperkuat ekonomi desa. Dari 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbentuk di Jawa Tengah, sebanyak 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan. Pemerintah juga mempercepat pemeriksaan kesiapan bangunan dan administrasi, serta menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi 5.040 bendahara koperasi. Selain itu, kerja sama usaha di 35 kabupaten dan kota terus dikembangkan agar koperasi dapat membantu menyediakan kebutuhan masyarakat, mendukung pemasaran produk lokal, dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha di desa.
- Bank Indonesia Purwokerto berupaya menjaga kestabilan harga cabai. Upaya ini dilakukan melalui pemantauan harga, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, kerja sama pasokan antardaerah, dan peningkatan produktivitas pertanian. Langkah tersebut diperlukan karena keterbatasan pasokan dan gangguan produksi dapat menyebabkan harga cabai meningkat dan membebani pengeluaran masyarakat. Dengan memperlancar distribusi dari daerah yang memiliki surplus serta meningkatkan hasil panen, ketersediaan cabai di pasar diharapkan lebih terjaga. Koordinasi antara pemerintah daerah, petani, dan pelaku distribusi juga penting agar pengendalian harga dapat berjalan secara berkelanjutan.

Implikasi

- Kenaikan inflasi di Jepang menunjukkan bahwa tekanan harga masih menjadi perhatian utama dalam perekonomian global. Inflasi harga grosir Jepang yang mencapai 6,8% pada September 2026, disertai pelemahan yen, dapat mendorong Bank of Japan mempertimbangkan kebijakan suku bunga yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada 2026, sementara konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya produksi serta menekan daya beli masyarakat di berbagai negara.
- Meningkatnya investasi pada teknologi kecerdasan buatan (AI) membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, manfaatnya berpotensi tidak merata karena negara yang memiliki teknologi, modal, dan tenaga kerja terampil lebih siap memanfaatkannya dibandingkan negara yang masih menghadapi keterbatasan tersebut.

- Konflik di Timur Tengah berpotensi memperbesar tekanan terhadap harga energi dunia. Apabila harga minyak terus meningkat hingga melampaui US\$100 per barel, biaya transportasi dan produksi dapat ikut naik sehingga mendorong inflasi serta meningkatkan beban negara yang bergantung pada impor energi.
- Meningkatnya investasi AI dan risiko utang publik dapat memengaruhi kestabilan keuangan global apabila tidak diimbangi pengelolaan risiko yang baik. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu mempertimbangkan manfaat investasi sekaligus menjaga kondisi keuangan agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan.
- Pelemahan mata uang sejumlah negara Asia, termasuk rupiah, menunjukkan adanya tekanan dari kondisi ekonomi global. Perubahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, sehingga negara-negara di kawasan Asia perlu menjaga stabilitas mata uang serta mengantisipasi dampaknya terhadap inflasi domestik.
- Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pada 13 Oktober 2026, rupiah melemah 0,22% menjadi Rp17.935 per dolar AS dan tercatat turun 7,05% sepanjang tahun, sehingga biaya impor berpotensi meningkat dan harga barang dalam negeri dapat ikut tertekan.
- Kebijakan pembayaran tunggakan pajak melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 memberikan penekanan pada pelunasan pokok utang pajak sebelum sanksi administrasi. Kebijakan ini perlu dipahami secara tepat karena bukan merupakan penghapusan pajak, melainkan pengaturan penyelesaian kewajiban yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Penurunan jumlah masyarakat kelas menengah dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kebijakan yang mampu menjaga daya beli agar masyarakat tidak semakin rentan terhadap kenaikan biaya hidup.
- Komitmen pemerintah menjaga defisit fiskal sebesar 3% dari PDB dan rasio utang sebesar 60% dari PDB menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara hati-hati. Di tengah kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat, belanja pemerintah perlu diarahkan pada program yang produktif tanpa mengabaikan keberlanjutan anggaran.
- Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% perlu didukung oleh peningkatan kualitas tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Bonus demografi dapat menjadi peluang bagi Indonesia apabila penduduk usia produktif memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
- Penerimaan pajak yang belum mencapai target menunjukkan perlunya penguatan administrasi dan kepatuhan perpajakan. Penerimaan pajak di Jawa Barat tercatat sebesar Rp77 triliun dari target Rp122 triliun hingga 30 September 2026, sehingga pemanfaatan data, pengembangan sistem Coretax, dan pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk memperbaiki penerimaan negara.
- Dugaan masuknya tekstil impor ilegal dan praktik dumping dapat menekan daya saing industri tekstil dalam negeri. Asosiasi industri menyebutkan bahwa lebih dari 100 perusahaan tutup dan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan selama empat tahun terakhir, sehingga pengawasan impor dan penegakan aturan perdagangan diperlukan untuk melindungi industri serta tenaga kerja lokal.
- Kenaikan harga cabai menunjukkan bahwa pasokan dan distribusi pangan masih perlu diperhatikan. Harga cabai rawit merah tercatat Rp105.300 per kilogram, cabai merah besar Rp73.800 per kilogram, dan cabai merah keriting Rp88.350 per kilogram, sehingga pemantauan harga serta kelancaran distribusi penting untuk mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga.
- Perubahan cakupan bantuan pangan menunjukkan pentingnya ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Persentase rumah tangga penerima bantuan pangan turun menjadi 15,08%

pada 2026, sementara pertumbuhan belanja bantuan sosial tercatat 3,4%, sehingga pemerintah perlu memastikan bantuan tetap menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

- Penerimaan negara yang mencapai Rp2.055,6 triliun hingga Agustus 2026 memberikan dukungan bagi pelaksanaan program pemerintah. Namun, pemanfaatan penerimaan tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika pelemahan rupiah dan kenaikan harga pangan berpotensi menambah beban pengeluaran.
- Pengembangan Koperasi Merah Putih dapat memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah. Dari 8.523 koperasi yang tercatat, sebanyak 5.427 koperasi atau sekitar 64% telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan, sehingga percepatan operasional diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
- Peningkatan kemampuan pengelola koperasi menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan usaha. Pelatihan dan sertifikasi bagi 5.040 bendahara koperasi diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi dalam menjalankan kegiatan koperasi.
- Koperasi berpotensi memperluas pemasaran produk UMKM dan hasil produksi lokal. Produk seperti jamur kuping, kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran, dan kerajinan wayang dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas melalui jaringan koperasi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
- Gangguan pasokan cabai akibat cuaca dan serangan hama tanaman dapat memengaruhi kestabilan harga pangan di Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemantauan produksi dan distribusi secara berkala agar kekurangan pasokan di suatu wilayah dapat segera ditangani sebelum mendorong kenaikan harga yang lebih besar.
- Kerja sama antardaerah dapat membantu mengatasi ketimpangan pasokan pangan. Daerah yang mengalami surplus dapat memasok wilayah yang kekurangan sehingga distribusi menjadi lebih lancar, biaya pengangkutan dapat ditekan, dan kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan bisa dikurangi.
- Peningkatan produktivitas pertanian menunjukkan bahwa pendampingan dan penerapan metode budidaya yang tepat dapat memberikan hasil positif. Produktivitas di Banjarsari Kulon, Banyumas, meningkat dari 8,9 menjadi 10 ton per hektare, sedangkan hasil di lahan percontohan pesantren naik dari 0,5 menjadi 3 ton per hektare, sehingga praktik tersebut berpotensi dikembangkan di wilayah lain.
- Dukungan terhadap sarana pertanian diperlukan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Penyediaan alat pertanian, perbaikan irigasi, serta kelancaran transportasi dapat membantu petani meningkatkan hasil panen dan menghadapi risiko perubahan cuaca, termasuk ancaman El Niño yang dapat mengganggu ketersediaan air.

Berita Rabu, 14 Oktober

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada Rabu, 14 Oktober 2026, menunjukkan bahwa perekonomian dunia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat kenaikan harga energi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian kondisi keuangan global. Di China, indeks harga produsen meningkat sebesar 5% secara tahunan pada September, didorong oleh kenaikan harga minyak, logam, serta komponen elektronik yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Sementara itu, inflasi konsumen China masih relatif rendah, yaitu 0,9%, yang menunjukkan bahwa pemulihan permintaan masyarakat belum sekuat perkembangan sektor industrinya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun aktivitas produksi mulai membaik, kenaikan biaya bahan baku tetap menjadi tantangan bagi perusahaan dan konsumen.

Tekanan harga yang terjadi di China juga berkaitan dengan perkembangan perdagangan internasional, terutama meningkatnya kebutuhan energi dan komponen teknologi. Pada September 2026, ekspor China tumbuh 36,3% secara tahunan, sedangkan impornya meningkat 31%, sehingga menunjukkan kuatnya aktivitas perdagangan negara tersebut. Namun, kenaikan ekspor dan impor yang tinggi tidak berarti seluruh persoalan ekonomi telah teratasi karena perusahaan masih menghadapi peningkatan biaya produksi dan ketidakpastian permintaan. Di sisi lain, pertumbuhan industri berbasis AI turut memberikan dorongan terhadap kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa di Singapura. Produk domestik bruto Singapura tumbuh 5,4% pada kuartal III-2026, melampaui perkiraan pasar, sehingga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi masih mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya tetap bergantung pada kondisi pasar global.

Di tengah perkembangan tersebut, Amerika Serikat juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya inflasi yang dapat memengaruhi kebijakan moneter dan kondisi pasar keuangan dunia. Inflasi tahunan AS naik menjadi 3,7% pada September 2026, dari 3,4% pada Agustus, terutama karena harga bensin meningkat 9,1% dalam satu bulan. Kenaikan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa tekanan harga akan meluas ke sektor lain dan membuat inflasi lebih sulit dikendalikan. Akibatnya, peluang Federal Reserve atau The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga semakin diperhitungkan oleh pasar. Apabila suku bunga AS tetap tinggi, biaya pinjaman dan pergerakan modal internasional dapat terpengaruh, sehingga negara-negara lain perlu mengantisipasi perubahan nilai tukar dan arus investasi yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomiannya.

Selain persoalan inflasi, kondisi keuangan global juga menghadapi risiko akibat meningkatnya beban pembayaran utang dan ketimpangan kemampuan ekonomi antarnegara. Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti bahwa negara berpenghasilan rendah semakin kesulitan memenuhi kewajiban utangnya karena biaya pembayaran utang telah meningkat menjadi rata-rata 14% dari pendapatan, dibandingkan sekitar 6% satu dekade sebelumnya. Oleh karena itu, IMF mendorong negara-negara anggotanya untuk memperkuat pendanaan bagi negara miskin dan negara yang rentan terhadap bencana. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Filipina yang mengingatkan negara-negara Asia agar mewaspadai kemungkinan terulangnya krisis keuangan seperti pada 1997. Peringatan ini menegaskan pentingnya menjaga arus modal, memperkuat ketahanan keuangan, dan mengantisipasi dampak konflik serta kenaikan harga energi agar tekanan ekonomi internasional tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Berbagai tantangan global tersebut menjadi perhatian penting bagi Indonesia karena perubahan harga komoditas, kebijakan suku bunga negara maju, dan pergerakan modal internasional dapat memengaruhi nilai tukar serta stabilitas ekonomi nasional. Pada saat tekanan eksternal meningkat, pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan kegiatan ekonomi dalam negeri tetap berjalan. Meskipun perekonomian Indonesia masih menunjukkan sejumlah indikator positif,

kondisi global yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko terhadap biaya impor, pembiayaan, dan aktivitas usaha. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi nasional perlu dilakukan melalui pengelolaan kebijakan yang hati-hati, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan potensi dalam negeri agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap perubahan yang berasal dari luar negeri.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih memiliki peluang untuk mempertahankan kinerja yang cukup baik, meskipun daya beli masyarakat menjadi salah satu tantangan utama. Survei Bloomberg memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% sepanjang 2026, didukung oleh aktivitas manufaktur yang kembali berada di zona ekspansi dengan indeks PMI sebesar 52,4 pada September serta surplus perdagangan sebesar US\$3,55 miliar pada Agustus. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan konsumsi rumah tangga. Indeks Keyakinan Konsumen turun menjadi 118,1 pada September, sementara penjualan mobil domestik berkurang sekitar 2,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan upaya menjaga pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga peningkatan produksi dan perdagangan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi rumah tangga dan pelaku usaha.

Upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi juga dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor yang memiliki potensi besar, salah satunya ekonomi dan keuangan syariah. Total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp3.131 triliun dengan pangsa pasar sebesar 11,36% terhadap aset keuangan nasional. Selain itu, ekspor produk halal Indonesia tumbuh 23% sepanjang 2025 menjadi US\$63,4 miliar, sedangkan rantai nilai halal atau halal value chain tercatat tumbuh 5,5% pada kuartal II-2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor halal memiliki peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pengembangan sektor ini masih membutuhkan penguatan data statistik, kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha, serta optimalisasi dana sosial syariah yang potensinya mencapai Rp343 triliun per tahun, tetapi realisasinya baru sekitar Rp41 triliun. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan sekaligus membuka kesempatan usaha yang lebih luas.

Di samping pengembangan sektor unggulan, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan anggaran dan kualitas sumber daya manusia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya investasi pada kualitas penduduk sejak masa awal kehidupan, pendidikan, hingga memasuki dunia kerja, terutama karena Indonesia diperkirakan akan menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia pada masa mendatang. Jika penuaan penduduk tidak diimbangi peningkatan produktivitas, kebutuhan belanja negara dapat meningkat sementara penerimaan negara berpotensi menghadapi tekanan. Pada saat yang sama, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan gula pada 14 Oktober 2026, dapat menambah beban pengeluaran masyarakat. Karena itu, kebijakan anggaran perlu menyeimbangkan kebutuhan masyarakat saat ini dengan investasi jangka panjang, sekaligus menjaga kestabilan harga agar daya beli tidak semakin melemah.

Berbagai persoalan ekonomi nasional tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi setempat. Di Jawa Tengah, Kabupaten Kendal mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu cara untuk membangkitkan pariwisata daerah melalui pemanfaatan seni, budaya, wisata alam, dan kuliner khas. Hingga 2026, terdapat 380 pelaku ekonomi kreatif di Kendal yang melibatkan 196 tenaga kerja laki-laki dan 184 tenaga kerja perempuan. Namun, baru 26 usaha yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya, sedangkan 354 usaha lainnya belum terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi kreativitas masyarakat perlu disertai perlindungan terhadap karya dan produk yang dihasilkan. Selain itu, kolaborasi antarpelaku usaha serta penyelenggaraan kegiatan seperti Pasar Kreatif Kendal dapat

membantu memperkenalkan produk lokal, menarik minat konsumen, dan memperluas peluang pemasaran.

Selain melalui ekonomi kreatif, penguatan perekonomian daerah juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan olahraga sebagai penggerak aktivitas usaha masyarakat. Kota Salatiga menjadi tuan rumah pertandingan pada 12 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVII Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 19–31 Oktober 2026. Kota ini menyiapkan kontingen yang terdiri atas 315 atlet, didukung oleh ofisial dan lebih dari 200 sukarelawan, sehingga kegiatan tersebut berpotensi mendatangkan pengunjung dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pertandingan. Pemerintah kota juga mendorong kerja sama antara penyelenggara pertandingan dan pelaku UMKM agar kebutuhan makanan serta layanan bagi atlet, ofisial, dan pengunjung dapat dipenuhi oleh usaha lokal. Dengan demikian, penyelenggaraan Porprov tidak hanya diarahkan untuk meraih prestasi olahraga, tetapi juga diharapkan menciptakan perputaran ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai berita internasional, nasional, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh stabilitas, daya saing, serta kemampuan memanfaatkan peluang secara berkelanjutan. Di tingkat internasional, kenaikan harga energi, tekanan inflasi, dan risiko keuangan menuntut negara-negara untuk memperkuat ketahanan ekonominya. Di Indonesia, peluang pertumbuhan masih terbuka melalui perdagangan, industri, ekonomi syariah, dan belanja pemerintah, tetapi upaya tersebut perlu disertai perlindungan daya beli, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta investasi pada kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, di Jawa Tengah, pengembangan ekonomi kreatif di Kendal dan pemanfaatan kegiatan olahraga di Salatiga menunjukkan bahwa potensi lokal dapat menjadi sumber pertumbuhan apabila didukung oleh kerja sama, inovasi, dan keterlibatan UMKM. Dengan menghubungkan kebijakan nasional dan potensi daerah, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terlihat dari angka statistik, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kesejahteraan secara merata.

Ringkasan

- Harga produsen di China meningkat sebesar 5% pada September 2026, sedangkan inflasi konsumen mencapai 0,9%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga energi dan logam serta meningkatnya kebutuhan semikonduktor untuk teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, konsumsi masyarakat yang masih lemah menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi China belum sepenuhnya merata.
- Ekspor China meningkat 36,3% dan impornya naik 31% pada September 2026. Sementara itu, ekonomi Singapura tumbuh 5,4% pada kuartal III, didukung oleh sektor industri, perdagangan, jasa, dan teknologi AI. Meski demikian, kenaikan harga energi dan pangan serta kemungkinan perlambatan investasi AI masih menjadi risiko bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.
- Inflasi Amerika Serikat naik menjadi 3,7% pada September 2026, dari 3,4% pada Agustus. Kenaikan harga bensin sebesar 9,1% menjadi salah satu faktor yang mendorong inflasi, sementara inflasi inti mencapai 2,6%. Kondisi ini menimbulkan kemungkinan perubahan kebijakan suku bunga bank sentral AS yang dapat memengaruhi pergerakan modal dan nilai tukar di berbagai negara.
- Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti meningkatnya beban pembayaran utang negara berpendapatan rendah. Rata-rata pembayaran utang kini mencapai 14% dari pendapatan pemerintah, dibandingkan sekitar 6% satu dekade sebelumnya. Kondisi tersebut dapat mengurangi anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga diperlukan dukungan pendanaan agar negara-negara tersebut mampu menjaga stabilitas ekonominya.
- Filipina mengingatkan negara-negara Asia agar mewaspadai kemungkinan terjadinya kembali krisis keuangan seperti pada 1997. Risiko tersebut dapat meningkat akibat konflik di Timur

Tengah, ketegangan perdagangan, investasi AI, dan ketergantungan pada impor energi. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan perlu memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan untuk menghadapi perubahan kondisi global.

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 5,2% berdasarkan survei Bloomberg, sedangkan IMF memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,1% pada 2026 dan 2027. Aktivitas manufaktur juga menunjukkan perbaikan, dengan indeks PMI naik dari 49,8 pada Agustus menjadi 52,4 pada September. Selain itu, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US\$3,55 miliar pada Agustus, meskipun penjualan mobil turun 2,7% dan kepercayaan konsumen berada pada angka 118,1.
- Belanja pemerintah meningkat 29% menjadi Rp1.791,5 triliun. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui belanja publik dan pelaksanaan berbagai program pemerintah. Namun, penggunaan anggaran tetap perlu diarahkan pada kegiatan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, IMF memperkirakan inflasi Indonesia mencapai 3,3% pada 2026 dan turun menjadi 2,8% pada 2027. Pengendalian anggaran dan inflasi menjadi penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
- Indonesia perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi dan menghadapi perubahan struktur penduduk. Jumlah penduduk diperkirakan meningkat dari sekitar 284 juta menjadi 325 juta dalam 20 tahun mendatang. Karena itu, peningkatan pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja menjadi penting agar pertambahan penduduk dapat mendukung pembangunan ekonomi.
- Aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp3.131 triliun dengan pangsa pasar sebesar 11,36%. Ekspor produk halal juga meningkat 23% pada 2025 menjadi US\$63,4 miliar, sedangkan rantai nilai halal tumbuh 5,5% pada kuartal II 2026. Meskipun potensi dana sosial Islam diperkirakan mencapai Rp343 triliun per tahun, realisasi yang tercatat baru sekitar Rp41 triliun sehingga pengelolaannya masih perlu diperkuat.
- Pada 14 Oktober, harga sejumlah bahan pangan, seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula, dan daging sapi, mengalami kenaikan. Harga cabai besar tercatat sebesar Rp76.400 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp104.750 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga sehingga pengendalian pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjadi hal penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Indonesia terus mengembangkan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan. Penerbitan sukuk hijau secara global mencapai US\$7,7 miliar, sementara nilai sukuk hijau domestik tercatat sebesar Rp108,9 triliun. Pengembangan instrumen ini dapat membantu menyediakan pembiayaan bagi kegiatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Perangkat desa dan kelurahan di Sragen memiliki peran penting dalam memastikan bantuan pengentasan kemiskinan diberikan kepada masyarakat yang tepat. Pengetahuan mereka mengenai kondisi warga dapat membantu pemerintah menilai kebutuhan dan kelayakan penerima bantuan. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar.
- Kabupaten Kendal memiliki 380 pelaku usaha ekonomi kreatif, dengan 196 pekerja laki-laki dan 184 pekerja perempuan. Namun, baru 26 usaha yang memiliki pendaftaran kekayaan intelektual, sedangkan 354 lainnya belum terdaftar. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman mengenai perlindungan karya dan merek usaha, sekaligus pengembangan Pasar Kreatif Kendal untuk memperluas pemasaran produk lokal.

- Kota Salatiga menjadi tuan rumah 12 cabang olahraga dalam Porprov XVII yang berlangsung pada 19–31 Oktober 2026. Persiapan kegiatan melibatkan 315 atlet, 75 petugas dari kampus, 21 petugas nonkampus, serta lebih dari 200 sukarelawan. Penyelenggaraan acara ini juga membuka peluang bagi UMKM setempat untuk meningkatkan penjualan melalui penyediaan makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan peserta maupun pengunjung.
- Berbagai kegiatan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi besar, tetapi juga pada program yang dekat dengan masyarakat. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran dapat membantu kelompok rentan, sedangkan pengembangan ekonomi kreatif membuka peluang usaha baru. Di sisi lain, kegiatan olahraga seperti Porprov dapat meningkatkan perputaran uang melalui keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal.

Implikasi

- Kenaikan harga produsen di China menunjukkan bahwa biaya produksi, terutama yang berkaitan dengan energi dan bahan baku, dapat semakin membebani kegiatan industri. Jika kenaikan tersebut berlanjut, perusahaan berpotensi menaikkan harga barang untuk menutup biaya produksi, sehingga dapat memengaruhi harga perdagangan internasional. Namun, lemahnya konsumsi masyarakat China juga menunjukkan bahwa kenaikan harga di tingkat produsen belum tentu diikuti oleh peningkatan permintaan domestik yang kuat
- Peningkatan ekspor dan impor China serta pertumbuhan ekonomi Singapura menunjukkan bahwa perdagangan dan industri masih menjadi penopang penting perekonomian Asia. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi negara mitra dagang untuk meningkatkan penjualan produk dan memperluas kerja sama ekonomi. Meski demikian, kenaikan biaya energi dan pangan tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan biaya usaha serta mengurangi daya beli masyarakat di kawasan.
- Kenaikan inflasi Amerika Serikat dapat mendorong bank sentralnya mempertahankan suku bunga tinggi atau mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus modal internasional, nilai tukar, dan biaya pinjaman di negara lain. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, kondisi ini menjadi alasan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengantisipasi perubahan pasar global agar tidak mengganggu kegiatan investasi maupun perdagangan.
- Besarnya pembayaran utang dibandingkan pendapatan pemerintah dapat mempersempit ruang anggaran negara berpendapatan rendah untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pengentasan kemiskinan. Apabila sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar utang, kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan utang dan dukungan pendanaan yang memadai menjadi penting agar kebutuhan pembangunan tetap dapat dipenuhi tanpa memperburuk kondisi fiskal.
- Peringatan mengenai kemungkinan terulangnya krisis keuangan menunjukkan pentingnya kesiapan negara-negara Asia dalam menghadapi gejolak ekonomi. Konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, kenaikan harga energi, dan ketidakpastian investasi teknologi dapat memengaruhi stabilitas pasar serta kepercayaan investor. Karena itu, negara-negara di kawasan perlu menjaga kondisi keuangan, memperkuat kerja sama ekonomi, dan mengantisipasi tekanan pada nilai tukar agar guncangan dari luar tidak berkembang menjadi masalah ekonomi yang lebih besar.
- Investasi pada kecerdasan buatan (AI) dapat mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan, tetapi manfaatnya berpotensi terkonsentrasi pada negara yang memiliki teknologi dan rantai pasok pendukung. Negara yang belum memiliki keterlibatan kuat dalam sektor tersebut dapat tertinggal apabila tidak meningkatkan kemampuan teknologi dan kualitas tenaga kerjanya. Dengan demikian, perkembangan AI menjadi peluang sekaligus tantangan yang

menuntut peningkatan keterampilan, inovasi, dan kesiapan dunia usaha untuk mengikuti perubahan ekonomi.

- Perbaikan indeks PMI manufaktur dan surplus perdagangan menunjukkan adanya peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan aktivitas ekspor. Namun, penurunan penjualan mobil memperlihatkan bahwa aktivitas konsumsi pada sektor tertentu masih menghadapi tantangan. Karena itu, pemerintah perlu menjaga iklim usaha dan mendorong daya beli masyarakat agar pertumbuhan tidak hanya didukung oleh perdagangan, tetapi juga oleh permintaan dalam negeri yang lebih kuat.
- Kenaikan belanja pemerintah dapat mendorong perputaran uang, meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, serta mendukung kegiatan usaha yang terlibat dalam program pembangunan. Akan tetapi, besarnya belanja belum tentu menghasilkan manfaat optimal apabila tidak diarahkan pada kegiatan yang produktif dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, pelaksanaan anggaran perlu disertai pengawasan yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, memperkuat kegiatan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang.
- Komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan negara. Di saat yang sama, pengendalian inflasi diperlukan agar kenaikan harga tidak mengurangi daya beli masyarakat secara berlebihan. Pemerintah perlu mengelola belanja secara hati-hati sekaligus menjaga stabilitas harga, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap anggaran maupun kehidupan rumah tangga.
- Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dapat menjadi peluang untuk memperluas pasar dan menyediakan tenaga kerja bagi berbagai sektor usaha. Namun, peluang tersebut bergantung pada kemampuan masyarakat memperoleh pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan penduduk dapat mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, bukan justru menambah tekanan terhadap lapangan kerja serta pelayanan publik.
- Besarnya aset keuangan syariah dan peningkatan ekspor produk halal menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi untuk memperluas kegiatan usaha dan membuka pasar baru. Potensi tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, termasuk UMKM yang bergerak di bidang makanan halal, fesyen, dan produk kreatif. Namun, kesenjangan antara potensi dana sosial Islam dan realisasi penghimpunannya menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan, kepercayaan masyarakat, dan penyaluran dana agar manfaatnya semakin luas bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Kenaikan harga beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula, dan daging sapi dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Jika pendapatan tidak meningkat sejalan dengan harga kebutuhan pokok, masyarakat harus mengurangi pengeluaran lain sehingga konsumsi dan kegiatan usaha tertentu dapat ikut terpengaruh. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memantau harga agar kebutuhan pokok tetap terjangkau.
- Perkembangan sukuk hijau menunjukkan adanya peluang untuk memperoleh pembiayaan bagi kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Jika dikelola dengan baik, instrumen ini dapat membantu mendukung proyek ramah lingkungan sekaligus memperluas pilihan pembiayaan bagi pemerintah dan pelaku usaha. Namun, penggunaan dana perlu diarahkan secara jelas dan transparan agar manfaat lingkungan serta manfaat ekonominya dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan.
- Kenaikan biaya energi, ketidakpastian perdagangan, dan perubahan kebijakan suku bunga di negara besar dapat memengaruhi biaya impor serta stabilitas ekonomi Indonesia. Tekanan tersebut juga dapat berpengaruh terhadap harga barang, keputusan investasi, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional

perlu memperhatikan perkembangan internasional sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan dalam negeri, seperti industri manufaktur, UMKM, perdagangan, dan sektor ekonomi syariah.

- Peran perangkat desa dan kelurahan dalam mengenali kondisi warga dapat meningkatkan ketepatan penerima bantuan sosial. Pemahaman terhadap keadaan ekonomi masyarakat dan kriteria bantuan membantu mengurangi risiko bantuan diberikan kepada pihak yang kurang sesuai dengan sasaran program. Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah daerah dan perangkat wilayah perlu diperkuat agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.
- Potensi seni, budaya, wisata alam, kuliner, dan produk kreatif di Kendal dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata daerah. Dengan adanya 380 pelaku ekonomi kreatif, sektor ini berpeluang menyediakan lapangan kerja dan memperluas pemasaran produk lokal. Namun, masih banyak usaha yang belum mendaftarkan kekayaan intelektual, sehingga pendampingan mengenai perlindungan merek dan karya perlu ditingkatkan agar produk memiliki identitas yang lebih kuat dan lebih terlindungi.
- Pengembangan Pasar Kreatif Kendal dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat dan meningkatkan transaksi bagi pelaku usaha. Kegiatan tersebut juga dapat mendorong kerja sama antarpelaku ekonomi kreatif sehingga mereka tidak hanya mengandalkan kemampuan masing-masing, tetapi dapat saling mendukung dalam promosi dan pemasaran. Jika dilakukan secara berkelanjutan, kolaborasi ini berpotensi memperkuat hubungan antara sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat
- Penyelenggaraan Porprov XVII di Salatiga pada 19–31 Oktober 2026 berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kehadiran atlet, ofisial, sukarelawan, dan pengunjung. Kebutuhan terhadap makanan, minuman, transportasi, dan layanan lainnya dapat membuka peluang pendapatan bagi pelaku usaha di sekitar lokasi pertandingan. Agar manfaatnya lebih luas, koordinasi antara panitia, pemerintah daerah, dan UMKM perlu dilakukan sehingga kegiatan olahraga tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal.
- Keterlibatan UMKM dalam penyelenggaraan Porprov dapat membantu pelaku usaha memperoleh pelanggan baru dan meningkatkan penjualan selama kegiatan berlangsung. Namun, peluang tersebut akan lebih optimal apabila kualitas makanan, harga, kebersihan, dan pelayanan dijaga dengan baik. Dengan persiapan yang terkoordinasi, kegiatan olahraga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat dan memperkuat hubungan antara penyelenggaraan acara daerah dengan perkembangan usaha kecil.
- Upaya penyaluran bantuan yang tepat di Sragen dan pengembangan ekonomi kreatif di Kendal menunjukkan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial membantu masyarakat yang membutuhkan, sedangkan kegiatan ekonomi kreatif dapat membuka kesempatan untuk memperoleh pendapatan secara lebih berkelanjutan. Jika disertai pembinaan usaha dan akses pasar, kedua pendekatan tersebut dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat daerah.
- Berbagai program di Jawa Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan kerja sama antara pemerintah, perangkat wilayah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah berperan menyediakan dukungan dan fasilitas, sedangkan masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi dalam program sosial, pengembangan produk, dan kegiatan ekonomi lokal. Kerja sama yang baik dapat membantu mengoptimalkan potensi daerah serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh lebih banyak kelompok masyarakat.

Berita Kamis, 15 Oktober

Kesimpulan

Keseluruhan berita internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, serta kesejahteraan masyarakat saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Berita internasional menggambarkan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara di dunia, mulai dari kenaikan inflasi di Amerika Serikat, perkembangan simpanan perbankan di India, perubahan aturan investasi Norwegia, hingga perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi Asia. Sementara itu, berita Indonesia menyoroti tekanan nilai tukar rupiah, peningkatan utang luar negeri, besarnya beban bunga utang pemerintah, dan kenaikan inflasi pangan. Di tingkat daerah, berita Jawa Tengah memperlihatkan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kerja sama pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan pelayanan publik. Rangkaian berita tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi perlu ditangani melalui kebijakan yang tepat dan kerja sama berbagai pihak.

Dari sisi internasional, kenaikan inflasi Amerika Serikat memperlihatkan bahwa tekanan harga masih menjadi tantangan bagi perekonomian global. Kenaikan harga bahan bakar, biaya perumahan, dan sejumlah barang serta jasa membuat pengeluaran masyarakat meningkat, meskipun aktivitas konsumsi dan investasi bisnis masih menunjukkan ketahanan. Kondisi tersebut turut mendorong perkiraan bahwa The Fed dapat menerapkan kebijakan suku bunga yang lebih ketat. Sementara itu, simpanan perbankan India yang mencapai rekor tertinggi menunjukkan besarnya dana yang dihimpun perbankan, tetapi pertumbuhan kredit yang lebih cepat juga berpotensi meningkatkan kebutuhan pendanaan dan memengaruhi suku bunga deposito. Kedua berita ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan pengelolaan sektor keuangan menjadi hal penting untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Selain persoalan inflasi dan perbankan, berita mengenai Norwegia menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan prinsip etika dengan kepentingan investasi negara. Rencana perubahan aturan investasi dana kekayaan negara senilai US\$2,3 triliun muncul setelah keputusan divestasi saham perusahaan Amerika Serikat menimbulkan polemik. Pemerintah Norwegia perlu mempertimbangkan prinsip etika, penyebaran risiko investasi, serta peran hasil investasi dalam mendukung belanja publik. Di sisi lain, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia melambat dari 4,8% pada 2026 menjadi 4,4% pada 2027 akibat risiko kenaikan harga energi, ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat, peningkatan imbal hasil obligasi, dan kemungkinan koreksi industri kecerdasan buatan. Hal ini memperlihatkan bahwa negara-negara Asia perlu menjaga stabilitas harga, mengelola keuangan publik secara hati-hati, dan memperkuat koordinasi kebijakan moneter serta fiskal.

Berbagai tekanan ekonomi internasional tersebut berkaitan dengan kondisi Indonesia, terutama terlihat dari pelemahan rupiah yang mendekati Rp17.950 per dolar Amerika Serikat pada 15 Oktober 2026. Kenaikan inflasi Amerika Serikat dan ketidakpastian konflik di Timur Tengah yang menjaga harga minyak di atas US\$105 per barel menjadi faktor eksternal yang menekan nilai tukar rupiah. Namun, berita juga menyoroti persoalan domestik, seperti ketergantungan terhadap aliran modal asing, tekanan pada neraca perdagangan, dan terbatasnya ruang fiskal. Kombinasi faktor tersebut menunjukkan bahwa kestabilan rupiah tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan global, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri. Pelemahan rupiah pun perlu dicermati karena dapat meningkatkan biaya impor dan menambah nilai kewajiban dalam mata uang asing ketika dikonversikan ke rupiah.

Persoalan nilai tukar tersebut semakin berkaitan dengan berita mengenai utang luar negeri Indonesia yang mencapai US\$459,3 miliar atau sekitar Rp8.220 triliun pada Agustus 2026, menjadi posisi tertinggi sepanjang sejarah berdasarkan laporan yang diberitakan. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh bertambahnya utang sektor publik, sedangkan utang luar negeri swasta mengalami

penurunan. Besarnya utang tidak serta-merta berarti seluruh kewajiban harus dibayar sekaligus, tetapi tetap membutuhkan pengelolaan yang cermat sesuai jadwal jatuh tempo dan kemampuan pembayaran. Ketika rupiah melemah, nilai kewajiban dalam mata uang asing dapat meningkat dalam perhitungan rupiah. Oleh sebab itu, pengelolaan utang, pemeliharaan cadangan devisa, serta penguatan penerimaan negara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mengurangi risiko terhadap perekonomian nasional.

Sejalan dengan peningkatan utang tersebut, berita mengenai beban bunga utang pemerintah memperlihatkan adanya tekanan terhadap kemampuan anggaran negara dalam membiayai berbagai kebutuhan. Pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp650,31 triliun atau sekitar 18,93% dari penerimaan negara pada 2027 menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya fiskal perlu dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Apabila beban tersebut terus meningkat, ruang untuk membiayai pembangunan, perlindungan sosial, dan program yang mendukung daya beli masyarakat dapat menjadi lebih terbatas. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak, memperbaiki kualitas belanja, dan mengendalikan kebutuhan utang baru. Pengelolaan fiskal yang sehat bukan hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga defisit, melainkan juga oleh kemampuan membiayai pelayanan publik secara berkelanjutan.

Di samping tekanan fiskal, kenaikan inflasi pangan Indonesia menjadi persoalan penting karena berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03% secara tahunan pada September 2026, lebih tinggi daripada inflasi umum sebesar 3,28%. Risiko gangguan pasokan akibat kondisi cuaca dan fenomena El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga April 2027 dapat menambah tekanan terhadap harga pangan. Apabila kenaikan harga bahan pangan meluas ke barang dan jasa lainnya, beban pengeluaran rumah tangga dapat semakin meningkat dan daya beli masyarakat berpotensi melemah. Dalam kondisi tersebut, pengendalian harga, pemeliharaan ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi menjadi penting. Di sisi lain, pengembangan ekonomi syariah, industri halal, dan UMKM juga menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan usaha, meningkatkan daya saing produk Indonesia, serta membuka akses pasar internasional.

Berbagai persoalan ekonomi nasional tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kestabilan makroekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Hal ini terlihat dalam berita Jawa Tengah mengenai Kopdes Merah Putih di Desa Pandeyan, Kabupaten Boyolali, yang menarik minat warga karena menawarkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan sejumlah toko lain. Selisih harga sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 untuk beberapa barang membantu masyarakat mengatur pengeluaran rumah tangga. Selain menyediakan kebutuhan pokok dan pupuk bersubsidi, koperasi tersebut juga mulai memasarkan produk UMKM lokal. Upaya pemerintah provinsi dalam mempercepat validasi gerai dan menyiapkan sertifikasi kompetensi bagi bendahara koperasi menunjukkan bahwa pengembangan koperasi desa tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga pada penguatan pengelolaan usaha dan potensi ekonomi setempat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga terlihat melalui kerja sama pemerintah provinsi dengan 123 perguruan tinggi dalam program pengentasan kemiskinan. Kolaborasi tersebut mencakup kegiatan kuliah kerja nyata tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemiskinan perlu ditangani melalui berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, kondisi tempat tinggal, dan kemampuan ekonomi keluarga. Peralihan dari pendekatan yang hanya mengandalkan bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian warga. Rencana penyediaan beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa turut memperlihatkan pentingnya pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, keberlangsungan pelayanan publik menjadi perhatian dalam berita mengenai perpanjangan perjanjian kerja 2.314 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan hingga akhir 2026. Perpanjangan tersebut memberikan kepastian administratif bagi pegawai yang bersangkutan dan membantu menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Penyelesaian dokumen sebelum masa perjanjian berakhir juga penting untuk mendukung ketertiban administrasi dan penggajian. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap perlu disertai pengelolaan anggaran yang sesuai serta perhatian terhadap kinerja pegawai. Berita ini melengkapi gambaran pembangunan daerah bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh harga kebutuhan pokok dan kesempatan ekonomi, tetapi juga oleh terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, seluruh berita tersebut menggambarkan bahwa perekonomian global, kebijakan nasional, dan pembangunan daerah saling terhubung. Tekanan inflasi, perubahan suku bunga, konflik geopolitik, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dapat memengaruhi nilai tukar, biaya pembiayaan, dan kestabilan ekonomi Indonesia. Pada saat yang sama, peningkatan utang, besarnya beban bunga, dan kenaikan harga pangan menuntut pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Di tingkat Jawa Tengah, pengembangan koperasi desa, pelibatan perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan, dan perpanjangan perjanjian kerja PPPK menunjukkan bentuk upaya yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, inti dari rangkaian berita ini adalah pentingnya pengelolaan ekonomi yang hati-hati, penggunaan anggaran yang efektif, penguatan usaha produktif, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan dapat dijaga secara berkelanjutan.

Ringkasan

- Inflasi di Amerika Serikat meningkat pada September 2026. Harga konsumen naik 0,6% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan inflasi tahunan mencapai 3,7%. Kenaikan ini terutama dipicu oleh melonjaknya harga bahan bakar, termasuk bensin yang naik 9,1% dalam satu bulan. Kondisi tersebut membuat biaya hidup masyarakat semakin tinggi dan mengurangi daya beli mereka.
- Kenaikan inflasi juga memengaruhi perkiraan kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed). Ekonom Jason Schenker memperkirakan The Fed dapat menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Desember jika kenaikan sebelumnya belum berhasil menekan inflasi. Namun, keputusan tersebut masih bergantung pada perkembangan data inflasi dan ketenagakerjaan. Data tersebut akan menjadi pertimbangan sebelum The Fed menentukan kebijakan berikutnya.
- Simpanan perbankan India mencapai sekitar 284 triliun rupee atau setara US\$2,99 triliun pada paruh kedua September 2026. Peningkatan ini didorong oleh kebijakan bank sentral India yang menarik dana dalam dolar Amerika Serikat. Perbankan juga berupaya memperkuat sumber pendanaan agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan dan kredit masyarakat.
- Meskipun simpanan terus meningkat, perbankan India masih menghadapi tantangan. Pertumbuhan kredit yang lebih cepat daripada pertumbuhan simpanan membuat bank membutuhkan tambahan dana. Kondisi ini dapat membatasi penurunan bunga deposito dan bahkan mendorong kenaikannya. Oleh karena itu, bank perlu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit agar kegiatan perbankan tetap berjalan dengan baik.
- Norwegia berencana meninjau kembali aturan etika investasi dana kekayaan negaranya yang bernilai US\$2,3 triliun. Rencana ini muncul setelah keputusan untuk melepas saham Caterpillar, perusahaan alat berat asal Amerika Serikat, menimbulkan polemik. Keputusan tersebut berkaitan dengan penggunaan produk perusahaan itu di Gaza dan Tepi Barat. Persoalan

ini kemudian mendorong parlemen Norwegia menangguhkan sementara kebijakan divestasi berbasis etika untuk dievaluasi.

- Pemerintah Norwegia perlu menyeimbangkan prinsip etika dengan kepentingan keuangan negara. Dana investasi tersebut memiliki peran penting karena hasil pengelolaannya menopang sekitar seperempat belanja publik. Pemerintah juga menyoroti besarnya investasi pada sejumlah perusahaan teknologi Amerika Serikat. Karena itu, perubahan aturan diharapkan dapat menjaga penyebaran risiko investasi sekaligus mempertahankan kestabilan dana negara.
- Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Asia tumbuh 4,8% pada 2026 dan melambat menjadi 4,4% pada 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5% pada 2025. Perlambatan ini dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat, dan kemungkinan penurunan permintaan terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI.
- IMF juga memperingatkan bahwa konflik yang berlangsung lama dapat mempertahankan harga energi pada tingkat tinggi. Kondisi ini berisiko menekan negara-negara yang bergantung pada impor energi. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi global dapat menambah tekanan terhadap pasar keuangan Asia. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan ini perlu menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan keuangan untuk menghadapi berbagai risiko global.
- Nilai tukar rupiah melemah hingga mendekati Rp17.950 per dolar Amerika Serikat pada Kamis, 15 Oktober 2026. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya inflasi di Amerika Serikat yang memperbesar kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. Selain itu, konflik di Timur Tengah turut mendorong kenaikan harga minyak dan menambah ketidakpastian ekonomi dunia.
- Tekanan terhadap rupiah juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dalam negeri. Surplus perdagangan Indonesia pada Januari–Agustus 2026 tercatat sebesar US\$7,25 miliar, turun dari US\$29,35 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena surplus perdagangan nonmigas berkurang dan perdagangan migas mengalami defisit. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kestabilan perdagangan dan memperkuat ekonomi dalam negeri agar Indonesia lebih mampu menghadapi perubahan ekonomi global.
- Bank Indonesia melaporkan bahwa utang luar negeri Indonesia mencapai US\$459,3 miliar pada Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar US\$220,9 miliar atau tumbuh 3,3% secara tahunan. Sementara itu, utang luar negeri swasta mencapai US\$195,6 miliar dan mengalami penurunan 0,8% secara tahunan.
- Peningkatan utang pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran dana ke Surat Berharga Negara (SBN). Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, konstruksi, dan transportasi. Meskipun utang dapat membantu membiayai pembangunan, penggunaannya harus direncanakan dengan baik. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan pembangunan lainnya.
- Pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp650,31 triliun pada 2027. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 18,93% dari penerimaan negara. Sementara itu, pembayaran bunga utang hingga Agustus 2026 telah mencapai Rp394,1 triliun. Besarnya kewajiban ini menjadi perhatian karena dapat mengurangi ruang anggaran untuk membiayai program pemerintah lainnya.
- Jika sebagian besar penerimaan negara digunakan untuk membayar bunga utang, dana untuk layanan publik dan pembangunan dapat menjadi lebih terbatas. Besarnya beban utang juga berpotensi memengaruhi penilaian investor terhadap kondisi keuangan negara. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak, memperbaiki kualitas belanja, dan mengendalikan kebutuhan utang baru. Langkah tersebut diperlukan agar anggaran negara tetap mampu mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
- Inflasi pangan di Indonesia mencapai 5,03% secara tahunan pada September 2026. Angka tersebut lebih tinggi daripada inflasi umum yang tercatat sebesar 3,28%. Sementara itu, inflasi

inti turun dari 2,92% pada Agustus menjadi 2,84% pada September. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga masih lebih banyak terjadi pada kelompok pangan.

- Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena El Niño diperkirakan berlangsung hingga akhir April 2027 dan berpotensi mengganggu pasokan pangan. Selain itu, indeks ekspektasi harga peritel untuk Februari 2027 meningkat dari 166,0 menjadi 177,9. Kenaikan ini menunjukkan bahwa peritel memperkirakan tekanan harga akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga ketersediaan bahan pokok dan memantau perkembangan harga agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.
- Pemerintah menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Pengembangan ini dilakukan melalui penguatan industri halal, peningkatan ekspor, perluasan pembiayaan syariah, dan kerja sama perdagangan internasional. Rantai nilai halal disebut berkontribusi hampir 25% terhadap produk domestik bruto Indonesia, dengan nilai sekitar Rp1.524 triliun pada kuartal IV-2025. Selain itu, ekspor produk halal tumbuh 23% sepanjang 2025 menjadi US\$63,4 miliar.
- Meski memiliki potensi besar, pengembangan ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan survei tahun 2025, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43%, sedangkan tingkat inklusinya baru 13,24%. Untuk memperluas akses pembiayaan, Bank Indonesia mendorong kerja sama antara lembaga keuangan komersial dan lembaga sosial syariah melalui pemanfaatan zakat serta wakaf. Pemerintah juga berupaya membuka akses pasar internasional bagi UMKM halal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan daya saing, dan memperluas kesempatan kerja.
- Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pandeyan, Kabupaten Boyolali, mendapat sambutan baik dari warga karena menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Koperasi ini mulai beroperasi pada 14 September 2026 dan menjual berbagai barang, seperti beras, minyak goreng, gula, gas LPG, serta pupuk bersubsidi. Harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan dengan toko lain di sekitar wilayah tersebut.
- Sebagai contoh, minyak goreng Minyakita dijual seharga Rp15.700 per liter, sedangkan di luar koperasi harganya dapat mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000. Gas LPG juga dijual dengan harga Rp16.000, lebih rendah dibandingkan harga sekitar Rp20.000 di tempat lain. Selain menyediakan kebutuhan rumah tangga, koperasi ini mulai memasarkan lima produk UMKM lokal yang telah melalui seleksi kualitas. Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu warga menghemat pengeluaran sekaligus memberikan kesempatan bagi usaha lokal untuk memperluas penjualan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 123 perguruan tinggi dalam upaya mengurangi kemiskinan. Kerja sama ini mencakup penelitian, pendataan masyarakat, pendampingan usaha, penanganan rumah tidak layak huni, dan penanggulangan stunting. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat membantu mengembangkan solusi berdasarkan pengetahuan dan hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun dari 9,48% pada Maret 2025 menjadi 9,21% pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang. Melalui kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi, program penanganan kemiskinan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran. Masyarakat juga diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatannya.
- Pemerintah Kota Pekalongan memperpanjang perjanjian kerja bagi 2.314 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu hingga akhir 2026. Kebijakan ini memberikan

kepastian masa kerja bagi para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Perpanjangan tersebut juga membantu menjaga kelangsungan pelayanan kepada masyarakat agar tetap berjalan.

- Di sisi lain, pemerintah daerah tetap perlu menyesuaikan pengelolaan pegawai dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan anggaran. Perencanaan yang baik diperlukan agar keberadaan pegawai dapat mendukung pelayanan publik secara efektif. Dengan demikian, perpanjangan perjanjian kerja tidak hanya berkaitan dengan kepastian bagi pegawai, tetapi juga dengan upaya menjaga kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Implikasi

- Kenaikan inflasi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tekanan harga masih menjadi persoalan bagi perekonomian negara tersebut. Kondisi ini dapat mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih besar pada Desember apabila kenaikan sebelumnya belum mampu menekan inflasi secara signifikan. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga keputusan The Fed akan memengaruhi aktivitas ekonomi dan pergerakan pasar keuangan.
- Kenaikan harga konsumen, terutama bahan bakar, membuat masyarakat Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga meningkat lebih cepat daripada upah, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dapat menurun. Kondisi ini juga dapat memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga dan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
- Peningkatan simpanan perbankan di India menunjukkan adanya perubahan dalam perilaku masyarakat dan kondisi penghimpunan dana oleh perbankan. Namun, pertumbuhan simpanan yang tinggi juga perlu diimbangi dengan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara sehat. Apabila suku bunga dan biaya pinjaman meningkat, masyarakat serta pelaku usaha dapat menjadi lebih berhati-hati dalam mengajukan kredit, sehingga kegiatan ekonomi perlu didukung oleh kebijakan perbankan yang tepat.
- Perubahan aturan etika pada dana kekayaan negara Norwegia menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan investasi terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pertimbangan tata kelola. Perubahan tersebut dapat memengaruhi cara dana negara mengelola investasinya serta menentukan perusahaan yang layak menjadi tujuan penanaman modal. Oleh karena itu, pengelolaan dana kekayaan negara perlu mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka panjang sekaligus prinsip etika yang menjadi dasar kebijakannya.
- Perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi Asia pada 2027 menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti kenaikan biaya energi, suku bunga, dan perubahan dalam industri kecerdasan buatan. Kondisi ini dapat memengaruhi kegiatan produksi, investasi, serta perdagangan antarnegara. Oleh sebab itu, negara-negara Asia perlu memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kemampuan beradaptasi agar pertumbuhan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
- Pelemahan rupiah menunjukkan bahwa kondisi pasar keuangan Indonesia menghadapi tekanan, terutama ketika nilai dolar AS menguat dan ketidakpastian ekonomi global meningkat. Jika pelemahan berlangsung, biaya impor dapat meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Kondisi ini membuat pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi, sementara pelaku usaha harus mengantisipasi perubahan biaya produksi dan perdagangan.
- Besarnya utang luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa kewajiban pembiayaan negara dan sektor ekonomi perlu dikelola secara hati-hati. Utang dapat mendukung pembangunan apabila digunakan untuk kegiatan produktif, tetapi jumlah yang terus meningkat juga dapat menambah beban pembayaran pada masa mendatang. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan dana pinjaman memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kewajiban yang harus ditanggung.

- Besarnya anggaran bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp650,31 triliun atau 18,93% dari penerimaan negara menunjukkan bahwa pembayaran kewajiban utang menyerap bagian penting dari anggaran pemerintah. Kondisi ini dapat membatasi ruang fiskal untuk membiayai program lain apabila penerimaan negara tidak tumbuh sesuai harapan. Oleh karena itu, pengelolaan utang dan peningkatan penerimaan negara menjadi penting agar kebutuhan pembangunan tetap dapat dipenuhi.
- Kenaikan inflasi pangan menunjukkan bahwa masyarakat berpotensi menghadapi peningkatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ancaman El Niño hingga April 2027 juga dapat memengaruhi produksi pertanian dan ketersediaan sejumlah bahan pangan. Apabila pasokan terganggu, harga dapat semakin meningkat, sehingga pemerintah perlu menjaga kelancaran distribusi, memperkuat ketersediaan pangan, dan mengantisipasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
- Komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan negara. Di tengah tekanan nilai tukar, utang, dan kenaikan harga, penggunaan anggaran perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang terukur, pemerintah diharapkan tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas keuangan negara.
- Penguatan ekonomi syariah dapat membuka peluang bagi industri halal, layanan keuangan syariah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang lebih luas. Upaya memperkuat pengakuan sertifikasi halal antarnegara juga berpotensi mempermudah produk Indonesia memasuki pasar internasional. Dengan dukungan pembiayaan dan akses pasar yang lebih baik, ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan daya saing produk nasional serta memperluas kesempatan usaha.
- Penurunan kontrak utang luar negeri swasta menunjukkan adanya perubahan dalam aktivitas pembiayaan perusahaan dari luar negeri. Kondisi ini dapat berkaitan dengan sikap pelaku usaha yang lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman di tengah ketidakpastian ekonomi dan perubahan biaya pembiayaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola kebutuhan modal secara cermat agar kegiatan usaha tetap berjalan tanpa menimbulkan risiko utang yang berlebihan.
- Kehadiran Kopdes Merah Putih di Desa Pandeyan, Boyolali, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selisih harga sejumlah barang dapat membantu warga menghemat pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng dan gas LPG. Selain itu, penyediaan pupuk bersubsidi serta pemasaran produk UMKM lokal dapat membantu memenuhi kebutuhan petani sekaligus membuka peluang bagi usaha masyarakat desa.
- Pelibatan 123 perguruan tinggi menunjukkan bahwa upaya mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Perguruan tinggi dapat membantu melalui penelitian, pendataan, pendampingan usaha, penanganan masalah kesehatan, dan pengembangan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, program pengentasan kemiskinan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran serta mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
- Perpanjangan perjanjian kerja bagi 2.314 PPPK Paruh Waktu di Kota Pekalongan memberikan kepastian administratif bagi pegawai yang memenuhi persyaratan hingga akhir 2026. Penyelesaian dokumen sebelum masa kontrak berakhir juga membantu menjaga kelancaran penggajian dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan kinerja pegawai serta memastikan ketersediaan anggaran agar perpanjangan kontrak dapat berjalan sesuai ketentuan.

- Berita internasional menunjukkan bahwa kenaikan inflasi, perubahan suku bunga, dan perlambatan ekonomi dapat memengaruhi kondisi perekonomian berbagai negara. Perkembangan tersebut berpotensi berdampak pada Indonesia melalui perubahan nilai tukar, biaya impor, dan kondisi pembiayaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengelola anggaran negara secara hati-hati agar tekanan dari luar negeri tidak semakin membebani masyarakat.
- Di tingkat nasional, tantangan ekonomi tersebut berkaitan dengan pelemahan rupiah, besarnya utang, dan kenaikan harga pangan. Kondisi ini dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Karena itu, pengendalian inflasi, penguatan penerimaan negara, dan pengembangan sektor usaha produktif menjadi langkah penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
- Sementara itu, berita dari Jawa Tengah memperlihatkan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan ekonomi melalui program yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kopdes Merah Putih membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, perguruan tinggi dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan, dan perpanjangan kontrak PPPK membantu menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan daerah dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus melengkapi upaya pemerintah pusat dalam menjaga kondisi ekonomi.
- Secara keseluruhan, berita internasional, Indonesia, dan Jawa Tengah memperlihatkan keterkaitan antara stabilitas ekonomi, kemampuan pemerintah mengelola anggaran, dan kesejahteraan masyarakat. Tekanan ekonomi global perlu diantisipasi melalui kebijakan nasional yang tepat, sedangkan pelaksanaan program daerah perlu diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha, tantangan ekonomi diharapkan dapat dihadapi sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.